



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2021**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 ini disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap capaian kinerja secara periode triwulan sebagai alat analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Akhir kata, Atas ijin Allah SWT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh*

Jakarta, Januari 2022

SEKRETARIAS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA  
NIP. 19670320 199203 1 003

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I - 1</b>
I.1 Latar Belakang .....	I - 1
I.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	I - 4
I.3 Sumber Daya Manusia .....	I - 10
I.4 Sistematika Laporan.....	I - 11
1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	I - 12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>II - 1</b>
II.1 Perencanaan Strategis .....	II - 1
II.2 Perjanjian Kinerja.....	II - 3
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT</b> .....	<b>III - 1</b>
III.1 Capaian Kinerja.....	III - 1
III.2 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	III - 4
III.3 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2021.....	III - 6
III.4 Analisa Efisiensi Pembangunan Sumber Daya.....	III - 42
III.5 Realisasi Anggaran .....	III - 50
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV - 1</b>
IV.1 Kesimpulan .....	IV - 1
IV.2 Langkah Kedepan .....	IV - 1

## DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan .....	I - 10
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan .....	I - 11
I.5.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut..	I - 12
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (awal) .....	II - 2
II.2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (revisi) .....	II - 3
III.2.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubunga Laut Tahun 2021 .....	III - 4
II.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan.....	III - 6
III.3.2	Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) .....	III - 7
III.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kegiatan (IKK) Kesatu (1) .....	III - 9
III.3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 - 2024 pada Indikator Kegiatan (IKK) Kesatu (1) .....	III - 10
III.3.5	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut .....	III -11
III.3.6	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis).....	III - 11
III.3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2) .....	III – 12
III.3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2) ...	III – 13
III.3.9	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut ..	III – 14
III.3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)..	III – 15
III.3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)..	III – 16
III.3.12	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi /Kehumasan .....	III - 16
III.3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4) .....	III – 18

III.3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III – 18
III.3.15	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut ..... Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan.....	III - 19
III.3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 16 III – 23
III.3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5) ...	III – 24
III.3.18	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut .....	III – 24
III.3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III – 25
III.3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III – 26
III.3.21	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut .....	III – 26
III.3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 27
III.3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)...	III – 28
III.3.24	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut ..... Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut....	III – 28
III.3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8) .....	III – 30
III.3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8) .....	III – 30
III.3.27	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut .....	III – 31
III.3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9) .....	III – 34
III.3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	

	Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5) ...	III - 35
III.3.30	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN ..... Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut.....	III - 35
III.3.31	Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN) .....	III – 36
III.3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) .....	III - 37
III.3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) .....	III – 38
III.3.34	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan .....	III - 39
III.3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11) .....	III - 40
III.3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11) .....	III - 41
III.4.1	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021.....	III - 42
III.5.1	Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021.....	III - 50

## DAFTAR GRAFIK

III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan.....	III - 8
III.3.2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut .....	III - 12
III.3.3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut.....	III - 14
III.3.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan.....	III - 17
III.3.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut.....	III - 19
III.3.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut .....	III - 25
III.3.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut .....	III - 27
III.3.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut.....	III - 29
III.3.9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut .....	III - 33
III.3.10	Pencapaian Target Penetapan Penggunaan (PSP) BMN.....	III - 36
III.3.11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan.....	III - 39

## DAFTAR GAMBAR

I.2.1.	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I - 4
--------	---	-------



# BAB I

## SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2021

### I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja, dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2019 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya strategik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.

Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025,
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan,
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013,
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan,
  17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
  18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
  20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
  21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
  22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;
  23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
  25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
  27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

## I.2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(KM. 189 TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM No. 86 tahun 2016)



Gambar 1.2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SETDITJEN HUBLA

### a. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM 56 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 122 Tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**b. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
3. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
4. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
6. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**c. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- 1) Bagian Perencanaan;
- 2) Bagian Keuangan;
- 3) Bagian Kepegawaian;
- 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 5) Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- 6) Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

## 1) Bagian Perencanaan

### a) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### b) Fungsi Bagian Perencanaan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## 2) Bagian Keuangan

### a) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

### b) Fungsi Bagian Keuangan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan

- (3) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, - 134 - penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.

### **3) Bagian Kepegawaian**

#### **a) Tugas Bagian Kepegawaian**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

#### **b) Fungsi Bagian Kepegawaian**

- (1) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.

#### 4) Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

##### a) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

##### b) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- (1) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- (2) Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### 5) Bagian Umum dan Perlengkapan

##### a) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan..

##### b) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan

kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan

- (3) Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

## **6) Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

### **a) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### **b) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat**

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- (3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2021 yaitu 329 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

**Tabel I.3.1**

#### Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	S3	0	0
2.	Spesialis	0	1
3.	S2	45	42
4.	S1	128	129
5.	D4	1	1
6.	D3	57	56
7.	D2	0	0
8.	D1	2	6
9.	SLTA	96	90
10	SLTP	3	3
11.	SD	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>333</b>	<b>329</b>

- 2) Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

**Tabel I.3.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan**

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	1	0
3.	IV/c	1	1
4.	IV/b	6	5
5.	IV/a	8	7
6.	III/d	53	60
7.	III/c	63	61
8.	III/b	98	92
9.	III/a	32	35
10.	II/d	33	34
11.	II/c	32	22
12.	II/b	4	1
13.	II/a	1	10
14.	I/d	1	1
15.	I/c	0	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>333</b>	<b>329</b>

#### I.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

## I.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**Tabel 1.5.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<i>Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut</i>					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi Sdm Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12
		IKK 6	Nilai Akip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas Spip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,03
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	3



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2021

#### II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada RENSTRA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 – 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 – 2024.

#### II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejistik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 – 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2021 yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 disusun setelah DIPA Tahun 2021 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memuat pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Awal)**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<b>Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut</b>					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi Sdm Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900
		IKK 3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12
		IKK 6	Nilai Akip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas Spip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,15
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	3

Tabel II.2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut</b>					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi Sdm Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900
		IKK 3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12
		IKK 6	Nilai Akip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas Spip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	3



# BAB III

## CAPAIAN KINERJA

### SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2021

#### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelopran data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$



Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang draft RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





### III.2 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Tabel III.2.1

#### Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	0	0	0,09	0,09	0,09	10
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	298	388	506	889	889	46,79
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	90	90	90	82	82	100
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	3	4	4	4	4	100
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12	6	8	11	27	27	225
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	0	0	0	75,92	75,92	89,32



		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (Nilai Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan)	Nilai	3	0	0	0	2,96	2,96	98,67
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98	12,09	31,63	52,79	96,29	96,29	102,46
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10	3	21	23	23	23	23
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	10	3	7	8	10	10	100
		IKK11	Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	3	0	0	1	3	3	3



### III.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2021

#### SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan.**
  - a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1)**

**Tabel III.3.1**  
**Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh**  
**Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	0	0	0.09	0.09	0.09	10

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 9%. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II belum terdapat realisasi, dikarenakan penerimaan CPNS untuk tahun 2021 Kementerian Perhubungan masih menunggu informasi dari Kemenpan RB sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 0%, sedangkan untuk Triwulan III mengusulkan 1.197 penambahan CPNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan yang lulus sampai dengan seleksi akhir sebanyak 118 CPNS sehingga prosentase pada Triwulan III sebesar 10% dari jumlah Pegawai Tahun 2021 sebanyak 13.310 dan belum mencapai target hal ini dikarenakan Kondisi Keuangan Negara dan Kebijakan Kemenpan RB.



$$\text{Target 100\%} = \frac{(\text{Total Pegawai Tahun 2021})}{\text{Target Tahun 2021}}$$

$$\text{Target 100\%} = \frac{13.310}{9\%} = 1.197$$

$$\text{Persentase Peningkatan Kebutuhan SDM} = \frac{\text{Jumlah CPNS yang Lulus}}{\text{Target 100\%}}$$

$$\text{Persentase Peningkatan Kebutuhan SDM} = \frac{118}{1.197} = 0,09$$

Seleksi Kompetensi diselenggarakan pada tanggal 27 November s.d 13 Desember 2021. Adapun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di 15 Lokasi yaitu:

Tabel III.3.2

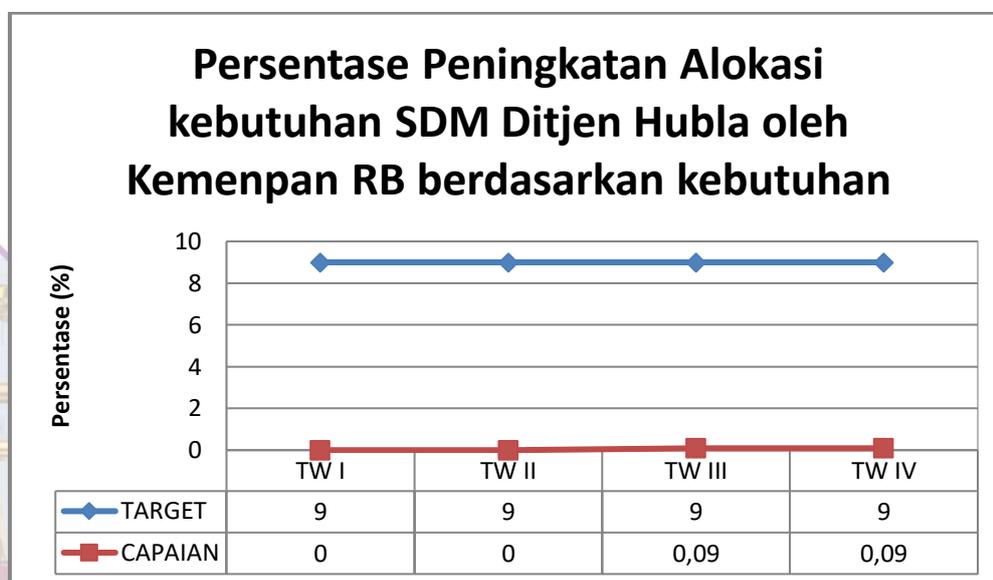
Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

NO	LOKASI TES	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Kantor Pusat BKN	3 4 s.d. 6 Desember 2021
2	UPT BKN Ambon	26 s.d. 28 November 2021
3	UPT BKN Serang	26 s.d. 28 November 2021
4	UPT BKN Balikpapan	27 s.d. 30 November 2021
5	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	27 s.d. 29 November 2021
6	UPT BKN Lampung	1 s.d. 3 Desember 2021
7	UPT BKN Kendari	26 s.d. 29 November 2021
8	UPT BKN Pontianak	29 November s.d. 1 Desember 2021
9	Kanreg XII BKN Pekanbaru	1 s.d. 3 Desember 2021
10	UPT BKN Bengkulu	29 November s.d. 2 Desember 2021
11	UPT BKN Mataram	26 s.d. 28 November 2021
12	UPT BKN Pangkal Pinang	27 s.d. 29 November 2021
13	UPT BKN Batam	28 s.d. 30 November 2021
14	Kanreg XI Manado	29 November s.d. 1 Desember 2021
15	UPT BKN Semarang	10 s.d. 14 Desember 2021

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



**Grafik III.3.1**  
**Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh**  
**Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1) pada Tahun 2021 tidak mencapai Target yang telah ditentukan dikarenakan Kondisi Keuangan Negara dan Kebijakan Kemenpan RB, sehingga dari Total Target penerimaan CPNS sebesar 1.197 hanya tercapai 118 CPNS sehingga Persentase hanya sebesar 10%.



**Tabel III.3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Target	0,89	9
				Realisasi	0,89	0,09
				Kinerja (%)	100	10

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) :**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesatu (1) ”**Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**” pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 0.09% sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 9% sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 10%, dikarenakan Kondisi Keuangan Negara dan Kebijakan Kemenpan RB.



Tabel III.3.4

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

## Kesatu (1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	0.09	10

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**2) Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut.**

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2)**

Tabel III.3.5

**Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	298	388	506	889	889	46,79

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 1.900 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 298 Sertifikat, Triwulan II terdapat realisasi sebesar 388 Sertifikat dan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 506 Sertifikat dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 889 Sertifikat sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 46.79% belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pemotongan anggaran dan adanya Pergub DKI No.106 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Ibu Kota sehingga berpengaruh kepada pembatasan pelaksanaan Diklat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Tabel III.3.6

## Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

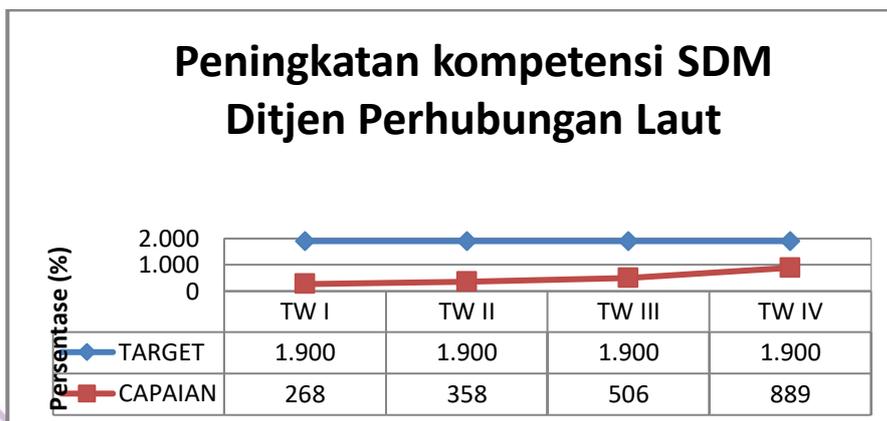
NO	DIKLAT	JUMLAH PESERTA	PEMBUKAAN	PENUTUPAN	KELULUSAN
1	Teknis Awal Dasar-Dasar Kesyahbandaran Angkatan I	30	20 Januari 21	28 Januari 21	30
2	Basic Commercial Survey	28	20 Januari 21	08 Februari 21	28
3	Penanganan Muatan Barang Berbahaya Angkatan I	30	20 Januari 21	06 Februari 21	30
4	Maritime English	30	20 Januari 21	18 Februari 21	30
5	Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal Angkatan li	30	09 Februari 21	22 Maret 21	30
6	Penanggulangan Pencemaran Tk. I	30	16 Februari 21	09 Maret 2021	30
7	Teknis Awal Dasar-Dasar Kesyahbandaran Angkatan li	30	16 Februari 21	24 Februari 21	30
9	Marine Inspector Type B Angkatan I	30	19 Februari 21	26 Maret 21	30
10	Pencegahan Pencemaran	30	01 Maret 21	29 Maret 21	30
11	Oru (Operator Radio Umum)	30	19 Maret 21	19 Maret 21	30
12	Auditor Ism Code	30	05 April 21	24 April 21	30
13	Pengawas Pemanduan	30	12 April 21	29 April 21	30
14	Tot 6.09 Angkatan I	30	21 Juni 21	29 Juni 21	30
15	Port State Control	30	27 Mei 21	09 Juli 21	28
16	Penyelenggara Pelabuhan Dan Otoritas	30	27 Mei 21	06 Juli 21	30
17	Kesyahbandaran Klas B	30	28 Juni 21	30 Juli 21	30
18	Marine Inspector Type A Angkatan I	30	12 Juli 2021	19 Agustus 21	30
19	Kesyahbandaran Klas A	24	01 Sept 21	15 Oktober 21	24
20	Kesyahbandaran Klas B Angkatan li	30	01 Sept21	04 Oktober 21	30
21	Marine Inspector Type A Angkatan li	30	27 Sept 21	4 November 21	30
22	Marine Inspector Type B Angkatan li	30	06 Okt 21	11 November 21	30
23	Pengukuran Kapal	30	13 Okt 21	06 Desember 21	30
24	Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal Angkatan li	30	25 Okt 21	06 Des 21	30
25	Penanganan Muatan Barang Berbahaya Angkatan li	30	11 Nov 21	30 Nov 21	29
26	Perwira Kapal Negara Tk. Iii (Dek)	30	28 Juni 21	01 Desember 21	30
27	Perwira Kapal Negara Tk. Iii (Mesin)	30	28 Juni 21	01 Desember 21	30
28	Basic Safety Training, Security Awareness Training, Advance Fire Fighting Angkatan I	30	27 Sept 21	9 Oktober 21	30
29	Basic Safety Training, Security Awareness Training, Advance Fire Fighting Angkatan li	30	25 Okt 21	06 Oktober 21	30
30	Tot 6.09 Angkatan li	30	11 Okt 21	19 Oktober 21	30
31	Tot 6.09 Angkatan Iii	30	11 Okt 21	19 Oktober 21	30
	<b>JUMLAH PESERTA DIKLAT TRIWULAN IV</b>	<b>892</b>			<b>889</b>

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



**Grafik III.3.2**

**Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut**



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2) pada Tahun 2020 sebanyak 1.408 Sertifikat sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 74,11%, sedangkan untuk Tahun 2021 sebanyak 889 sertifikat sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 46,79% dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pemotongan anggaran dan adanya Pergub DKI No.106 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Ibu Kota sehingga berpengaruh kepada pembatasan pelaksanaan Diklat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**Tabel III.3.7**

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	%	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut		Target	1.900	1.900
				Realisasi	1.408	889
				Kinerja (%)	74,11	46,79

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



- c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2)**  
 Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kedua (2) "Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 201 terdapat realisasi kinerja 889 Sertifikat sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 1.900 Sertifikat sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 46,79%, dikarenakan adanya penghematan anggaran dan pandemi Covid-19.

Tabel III.3.8

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	889	46,79

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### 3) Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut.

- a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3)**



Tabel III.3.9

## Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut

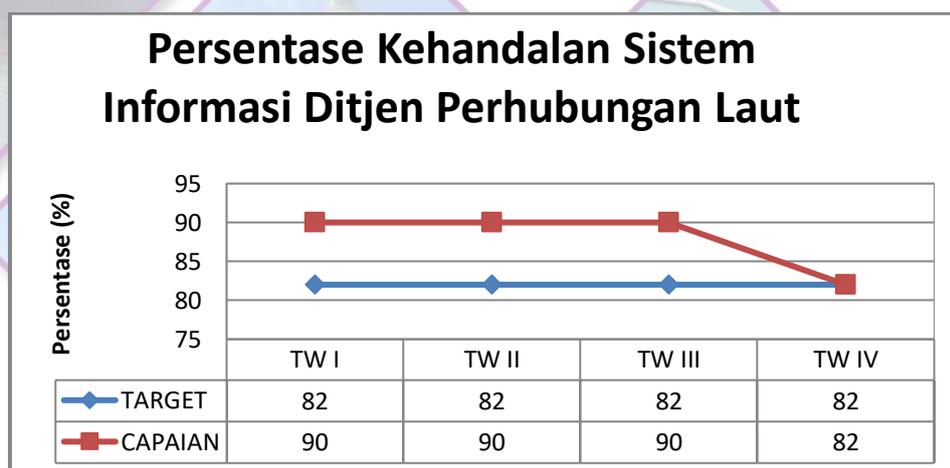
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 3 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	90	90	90	82	82	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun Sesuai dengan target tahun 2021 82% dengan nilai rata-rata kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 90%, sedangkan pada Triwulan IV sebesar 82% sehingga persentase Kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100% sistem bisa/dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu.

Grafik III.3.3

## Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut



Dalam suatu sistem yang handal harus memenuhi 4 prinsip yaitu :

1. Ketersediaan (*availability*).
2. Keamanan (*security*).
3. Dapat dipelihara (*maintainability*).
4. Integritas (*integrity*).



Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dengan rutin melakukan pengetesan keamanan sistem, melakukan pemuktahiran teknologi, *updating* dan *patching software* dan system operasi, perawatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3) pada Tahun 2021 pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% karena terdapat peningkatan dimana Pengembangan Portal Hubla dan SIRANI sudah selesai dilaksanakan dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana pencapaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 118,29% (sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam). Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dilaksanakan kegiatan integrasi layanan perijinan Sistem Informasi Perhubungan Laut (SIHUBLA), pengembangan portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pembangunan Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Elektronik (SIRANI).

**Tabel III.3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	82	82
				Realisasi	97	82
				Kinerja (%)	118,29	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3)**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kesatu (1) "Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 82% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 82% sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 100%.

**Tabel III.3.11**

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.3 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	82	100

4) **Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan**

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 4)**

**Tabel III.3.12**

**Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	Skala	4	3	4	4	4	4	100

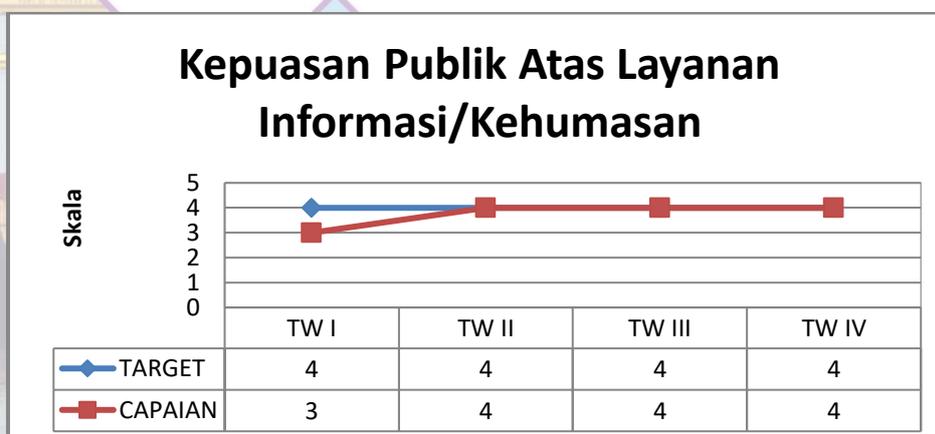
Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar Skala 4 dari 5 skala berdasarkan model perhitungan yang dibuat. Terlihat pada Triwulan I tercapai hasil perhitungan pada Skala 3 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sedangkan Pada Triwulan II dan Triwulan III dan Triwulan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

Grafik III.3.4

#### Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 4)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4) pada Tahun 2021 pencapaiannya sesuai dengan target yg telah ditentukan yaitu sebesar 4 skala dengan jumlah rata-rata responden pada masing-masing Triwulan sebesar 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 dilakukan survey kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Portal [hubla.dephub.go.id](http://hubla.dephub.go.id) terdapat realisasi sebesar 4 (empat) sehingga prosentasi capaian kinerja mencapai 100%.



Tabel III.3.13

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	%	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	%	Target	4	4
				Realisasi	4	4
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktora Jenderal Perhubungan Laut.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 4)**

Indikator Kinerja (IKK) Keempat (4) "Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan" pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 4 Skala sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 4 Skala sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

Tabel III.3.14

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/ Kehumasan	Skala	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktora Jenderal Perhubungan Laut



### 5) Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut.

#### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5)

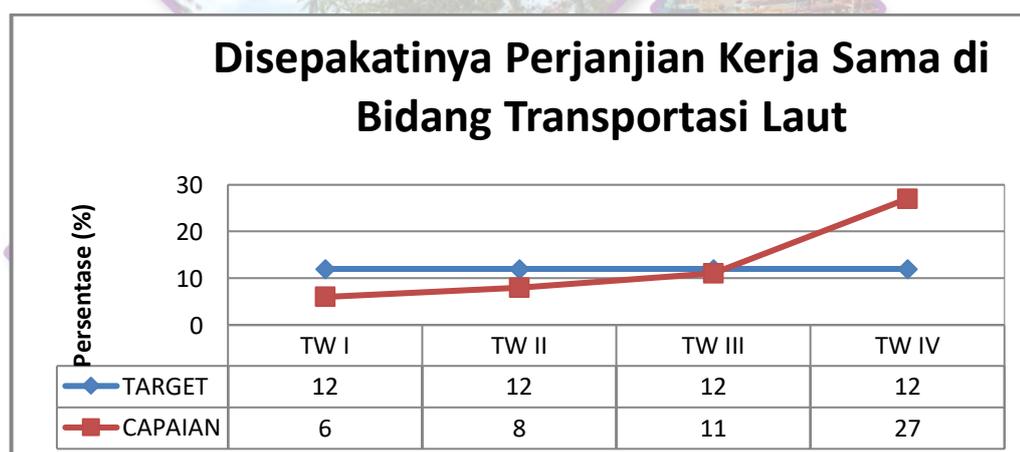
**Tabel III.3.15**  
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12	6	8	11	27	27	225

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebanyak 12 Perjanjian Kerjasama. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 6 Perjanjian Kerja Sama dan Pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 8 Perjanjian Kerja Sama, sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 66,67%. dan pada Triwulan III terdapat tambahan 3 Perjanjian sehingga total menjadi 11 Kerjasama sehingga persentase pencapaian terhadap target 91,66 % sedangkan untuk Triwulan IV terdapat 27 perjanjian sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 225 %

**Grafik III.3.5**  
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut





Adapun 27 Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Mitra Samudera Kreasi Nomor : HK.201/01/01/UPP.Trb/2021 dan Nomor : PKS-01/MKS/01/2021 Tanggal 11 Januari 2021;
2. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Mitra Samudera Kreasi Nomor : HK.201/01/02/UPP.Trb/2021 dan Nomor : PKS-02/MKS/01/2021 Tanggal 11 Januari 2021;
3. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Mitra Samudera Kreasi Nomor : HK.201/01/03/UPP.Trb/2021 dan Nomor : PKS-03/MKS/01/2021 Tanggal 11 Januari 2021;
4. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Titian Labuan Anugrah Nomor : HK.201/01/01/UPP.AGR/2021 dan Nomor : 005/BUP/TLA-GTO/1/2021 Tanggal 15 Januari 2021;
5. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Cabang Gorontalo Nomor : HK.201/01/02/UPP.AGR/2021 dan Nomor : 5/HK.301/I/GTO-20212021 Tanggal 25 Januari 2021;
6. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Pabrik Gula Gorontalo Nomor : HK.201/01/04/UPP.AGR/2021 dan Nomor : GM/III/21/006/CZ Tanggal 18 Maret 2021;
7. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Anggrek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Pabrik Gula Gorontalo Nomor : HK.201/01/04/UPP.AGR/2021 dan Nomor : GM/III/21/006/CZ Tanggal 18 Maret 2021;
8. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Survei dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia Nomor HK.201/2/7/DJPL/2021 dan Nomor B.05119/HK.503/KI-21 Tanggal 9 April 2021.
9. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo antara Kementerian Perhubungan (sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau "PJKP") dengan PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (sebagai Badan Usaha Pelaksana atau "BUP") Nomor HK.201/2/13/DJPL/2021 dan 004/PERJ/HST-AGIT/VII/2021 Tanggal 30 Juli 2021
10. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Makassar dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Apung Terpadu Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimptomatik Covid-19 di Kapal Motor Umsini Untuk Mendukung Program "Makassar Recover" Kota Makassar Nomor HK.201/2/14/DJPL/2021 Tanggal 2 Agustus 2021



11. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik
12. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Kota Sorong dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik Covid-19 Pada Kapal Motor Sirimau di Pelabuhan Sorong Nomor HK.201/2/16/DJPL/2021 Tanggal 12 Agustus 2021;
13. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Kota Medan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik Covid-19 Pada Kapal Motor Bukit Raya di Pelabuhan Belawan Nomor HK.201/2/17/DJPL/2021 Tanggal 12 Agustus 2021;
14. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik Covid-19 Pada Kapal Motor Lawit di Pelabuhan Panjang Nomor HK.201/2/18/DJPL/2021 Tanggal 12 Agustus 2021;
15. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan RI, Pemerintah Kota Jayapura dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Tempat Isolasi Terpusat Terhadap Penanganan Pasien Dengan Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala/Asimtomatik Covid-19 Pada Kapal Motor Tidar di Pelabuhan Jayapura Nomor HK.201/2/19/DJPL/2021 Tanggal 12 Agustus 2021;
16. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Integrasi Aplikasi Sitolaut Dengan Aplikasi Bristore dan Briva Web Service sebagai Layanan Pembayaran dan Penyampaian Informasi Pendaftaran Pengguna Pada Aplikasi Sitolaut Nomor HK.201/2/20/DJPL/2021 Tanggal 13 Agustus 2021;
17. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dengan Deputi Bidang Meteorologi Maritim dan Peringatan Dini Tsunami Dalam Menunjang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Serta Perlindungan Lingkungan Maritim Nomor HK.201/3/1/DJPL/2021 Tanggal 18 Agustus 2021;
18. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Prima Anugrah Sejahtera Nusantara tentang Sewa



- Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Alat (Travelt Cointainer Stacker) Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Tanjung Redeb, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur Nomor HK.201/01/18/UPP.Trb/2021 dan 180/OPS-PASN/IV/2021 Tanggal 29 Agustus 2021;
19. Perjanjian Sewa antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Mitra Samudera Kreasi tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Tanjung Redeb, Kabupaten Berau-Kalimantan Timur Nomor HK.201/02/02/UPP.Trb/2021 dan PKS-08/MKS/08/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
  20. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Indonesian Shipowners Association tentang Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi Help Desk Port State Control Nomor 12/PKS/MARVES/2021 Tanggal 17 September 2021;
  21. Perjanjian Kerja Sama Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional RI, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI, Ditjen Hubla Kemenhub RI tentang Pelaksanaan Operasi Laut Interdiksi Terpadu dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Nomor PKS/61/IX/2021/BNN Tanggal 14 September 2021;
  22. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Bontang dengan Ditjen Hubla Kemenhub tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kota Bontang Kepada Ditjen Hubla Kemenhub RI Nomor HK.201/3/18/DJPL/2021 Tanggal 14 Oktober 2021;
  23. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo Nomor HK.201/4/9/DJPL/2021 Tanggal 8 November 2021;
  24. Perjanjian Pemanfaatan Lahan antara Kantor KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dengan PT Jaya Annurya Karimun tentang Penggunaan/Pemanfaatan Tanah/Lahan Hasil Reklamasi Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 32.03.05.01.5.00005 Atan Nama Pemerintah RI c.q. Kemenhub Nomor HK.201/1/3/KSOP.TBK-2021 Tanggal 26 November 2021;
  25. Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Hubla Kemenhub dengan Badan Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika tentang Pemanfaatan Informasi Meteorologi Nomor HK.201/4/20/DJPL/2021 Tanggal 30 November 2021;
  26. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial



Ketenagakerjaan Bagi Awak Kapal dan Pekerjaan Lainnya di Bidang Pelayaran Nomor HK.201/5/15/DJPL/2021 tanggal 29 Desember 2021.

27. Memorandum Saling Pengertian tentang Saling Pengakuan Sertifikasi dan Pelatihan sesuai dengan Peraturan I/10 Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga untuk Pelaut, 1978 dan Perubahannya, antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA), ditandatangani secara sirkular oleh Menteri Energi dan Infrastruktur PEA pada tanggal 4 November 2021 dan oleh Menteri Perhubungan RI pada tanggal 20 Desember 2021

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK5)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5) pada Tahun 2021 terdapat realisasi sebanyak 27 perjanjian sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 225% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang hanya mencapai 11 Perjanjian dan hanya mencapai persentase sebesar 91,67%.

**Tabel III.3.16**

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Target	12	12
				Realisasi	11	27
				Kinerja (%)	91,67	225

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5)**



Indikator Kinerja (IKK) Kelima (5) ”Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang **Transportasi Laut**” pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 27 sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 12 sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 225%.

Tabel III.3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12	27	225

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

#### 6) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6)

Tabel III.3.18

Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	0	0	0	75,92	75,92	89,32

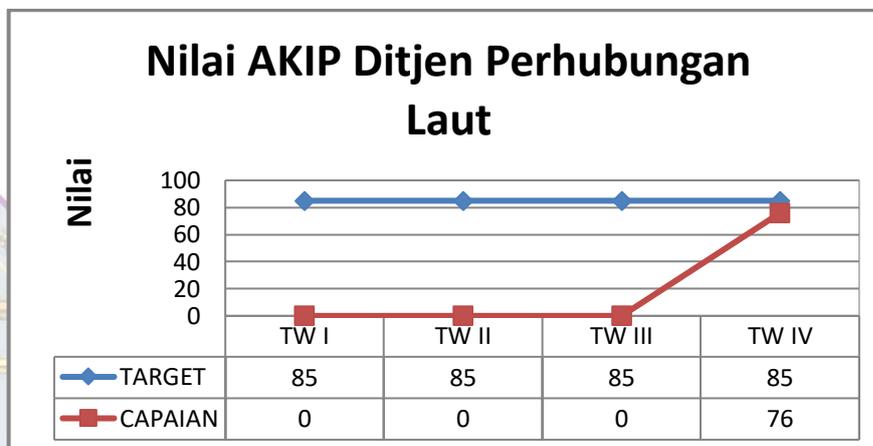
Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



Untuk Tahun 2021 target dari Nilai AKIP sebesar 85 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan III belum terdapat realisasi, dan untuk Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 75,92, sehingga prosentase Kinerja sebesar 89,32%.

**Grafik III.3.6**

**Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut**



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2021 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6) pada Tahun 2021 telah menerima hasil evaluasi Dokumen SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar 75,92, sehingga prosentase Kinerja sebesar 89,32% sedangkan pada Tahun 2020 mendapatkan Nilai sebesar 95,77 sehingga mengalami penurunan dari Nilai tahun sebelumnya.

**Tabel III.3.19**

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	82	85
				Realisasi	81,41	75,92
				Kinerja (%)	95,77	89,32

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6) pada Tahun 2021 telah menerima hasil evaluasi Dokumen SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar 75,92, sehingga prosentase Kinerja sebesar 89,32%.

**Tabel III.3.20**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	75,92	89,32

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**7. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.**

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)**

**Tabel III.3.21**

**Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	0	0	2,96	2,96	98,67

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

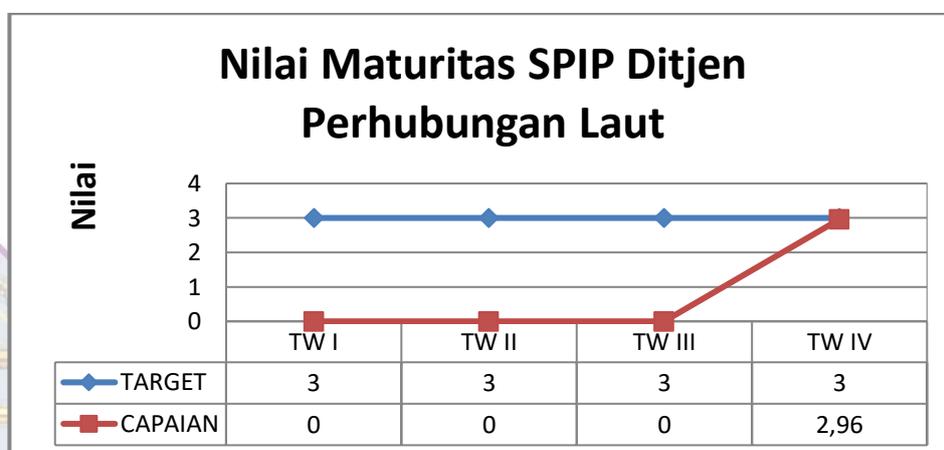
Untuk Tahun 2021 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan III belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi



Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 2,96.

Grafik III.3.7

Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7) pada Tahun 2021 terdapat realisasi sebesar 2,96 terhadap target kinerja Tahun 2021 sebesar 3 sehingga prosentase yang didapat sebesar 98,67%

Tabel III.3.22

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	3	3
				Realisasi	2,95	2,96
				Kinerja (%)	98,33	98,67

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Ketujuh (7) "Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan Nilai Maturitas SPIP sebesar 2,96 Nilai sedangkan target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 3 Nilai sehingga prosentase Kinerja sebesar 98,67% dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Tabel III.3.23**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	2,96	98,67

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**8. Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut.**

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8)**

**Tabel III.3.24**

**Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98	12,09	31,63	52,79	96,29	96,29	102,46

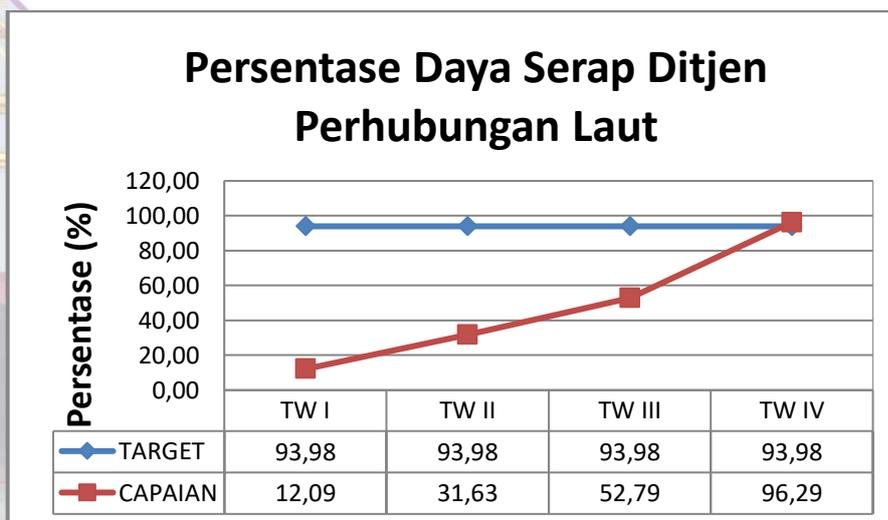
Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

(diakses pada tanggal 25 Januari 2022)



Adapun sesuai dengan target kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 93,98%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 12,09%, pada Triwulan II terdapat realisasi anggaran sebesar 31,63%, pada Triwulan III terdapat realisasi anggaran sebesar 57,29%, dan pada Triwulan IV terdapat realisasi anggaran sebesar 96,29% data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (posisi 31 desember 2021 (unaudited)) yang diakses pada tanggal 18 Januari 2022)), sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 102,46%.

**Grafik III.3.8**  
**Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut**



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8) pada Tahun 2021 Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut posisi 31 desember 2021 (unaudited)) yang diakses pada tanggal 18 Januari 2022))realisasi anggaran sebesar 96,29% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 102,46% dan melebihi dari target yang telah di ditetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut sehingga melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan pada Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 95,98% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 100,64%.



Tabel III.3.25

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021  
dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	95,37	93,98
				Realisasi	95,98	96,29
				Kinerja (%)	100,64	102,46

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8)**

Indikator Kinerja Kinerja (IKK) Kedelapan (8) "Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut" pada Tahun 2021 Daya Serap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 31 Januari 2021) realisasi anggaran sebesar 96,29% sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 102,46% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut.

Tabel III.3.26

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98	96,29	102,46

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut



## 9. Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut.

### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9)

**Tabel III.3.27**  
**Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10	3	21	23	23	23	230

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebanyak 10 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 3 Rancangan Peraturan Menteri dan Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar 21 Rancangan Peraturan Menteri sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 210%, sedangkan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realiasi 3 rancangan sehingga Prosentase pencapaian terhadap target sebesar 230 %.

Adapun pada Triwulan II telah ditetapkan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Laut;
2. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal;
3. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;



4. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
6. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;
7. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya;
9. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
10. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
11. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal;
12. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga;
13. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
14. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
15. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi;
16. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
17. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan;



18. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan;
19. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
20. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
21. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Pada Triwulan III dan Triwulan IV, Adapun 2 Rancangan Peraturan Menteri yang sedang dalam proses pembahasan, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang *Inaportnet*; dan
2. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang *Wing In Ground*

**Grafik III.3.9**  
**Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/ Revisi/ Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut**





**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9) pada Tahun 2021 terdapat realisasi sebesar 23 dokumen Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut sehingga persentase pencapaiannya sebesar 230% telah melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 10 Dokumen dan persentase terhadap target sebesar 100%.

**Tabel III.3.28**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Pencapaian Target	Jumlah	Pencapaian Target	Jumlah	Target	10	10
Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut		Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut		Realisasi	10	23
				Kinerja (%)	100	230

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) :**

Indikator Kinerja (IKK) Kesembilan (9) "Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut" pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 23 Jumlah Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 10 Jumlah Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.29

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	%	10	23	230

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

**10. Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN**

**a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN (IKK 10)**

Tabel III.3.30

**Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Jumlah	10	3	7	8	10	10	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

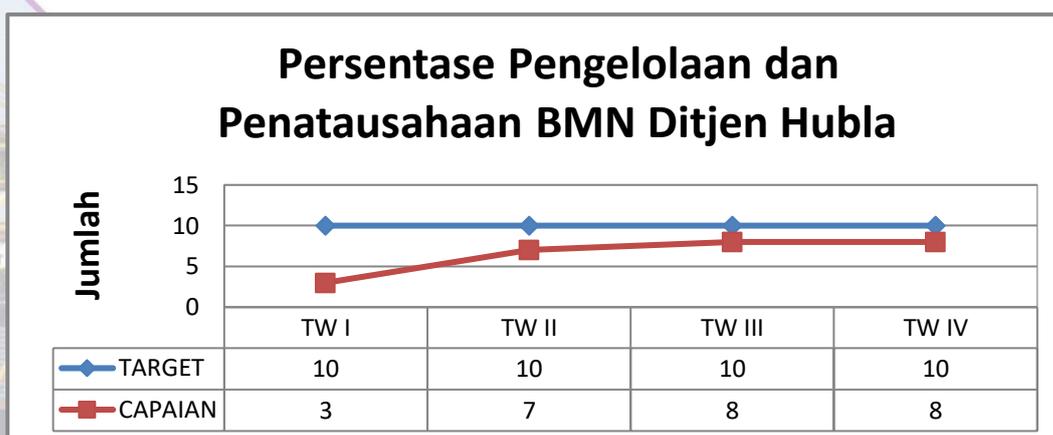
Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sejumlah 10 kegiatan (Lokasi). Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sejumlah 3 kegiatan yaitu PSP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, KSOP Kelas III Sunda Kelapa dan PSP KSOP Kelas IV Marunda. Sedangkan pada Triwulan II terdapat tambahan PSP sejumlah 4 kegiatan yaitu PSP KSOP Kelas IV Tanjung Pandan, KUPP Kelas



III Sadai, sedangkan pada KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun. Pada Triwulan III terdapat tambahan PSP sejumlah 1 kegiatan yaitu Pangkalan PLP Kelas II Bitung sedangkan pada Triwulan ke IV terdapat tambahan PSP sejumlah 2 kegiatan yaitu KUPP Kelas III Pulau Bunyu dan KSOP Kelas III Kuala Tanjung.

**Grafik II.3.10**

**Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN**



**Tabel III.3.31**

**Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)**

No.	Lokasi	Total BMN		BMN yang sudah di PSP		Persentase	Triwulanan
		Kuantitas	Luas (m <sup>2</sup> )	Kuantitas	Luas (m <sup>2</sup> )		
1.	KSU Tanjung Priok	905	2.750	863	2.750	98	I
2.	KSOP Kelas III Sunda Kelapa	950	801	829	800	77	
3.	KSOP Kelas IV Marunda	505	681	414	681	83	
4.	KSOP Kelas IV Tanjung Pandan	388	47.572	381	47.572	100	II
5.	KUPP Kelas III Manggar	396	14.235	396	14.235	100	
6.	KUPP Kelas III Sadai	320	13.479	319	13.199	100	



7.	KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun	1.862	27.936	1.732	27.666	97	
8.	PLP Kelas II Bitung	1.586	8.310	1.453	8.310	99	III
9.	KUPP Kelas III Pulau Bunyu	149	3.508	106	2.244	98,51	IV
10.	KSOP Kelas III Kuala Tanjung	1.071	12.441	997	12.441	99,43	

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN (IKK 10)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) target kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 ada penurunan target, dari target 17 pada tahun 2020 menjadi target 10 pada tahun 2021 dan realisasi pada tahun 2021 sebesar 10 jumlah PSP sehingga prosentasi sebesar 100%.

**Tabel III.3.32**

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN -	Jumlah	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Jumlah	Target	17	10
				Realisasi	17	10
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 10)**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10) "Pencapaian Target Penyusunan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN" pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 10 Jumlah Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 10 Jumlah Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dan persentase pencapaiannya sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel III.3.33**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	%	10	10	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



### 11. Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

#### a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target PK Revisi Tahun 2021 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11)

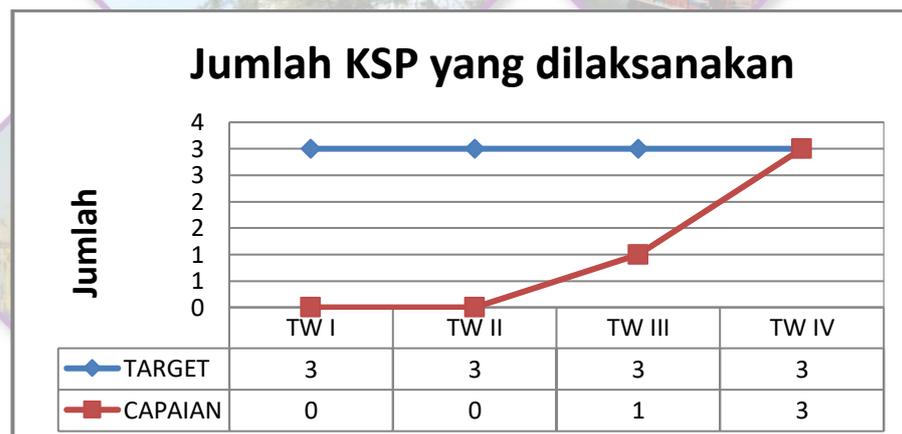
**Tabel III.3.34**  
**Jumlah KSP Yang Dilaksanakan**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2021					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 11 Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	3	0	0	1	3	3	100

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebanyak 3 jumlah. Pada Triwulan I dan Triwulan II belum ada realisasi karena masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan sedangkan pada Triwulan III telah terlaksana pada 1 lokasi KSP di KUPP Kelas III Garongkong (menunggu penilaian aset dari Kementerian Keuangan) sedangkan pada Triwulan IV telah terlaksana pada 2 lokasi KSP di KSOP Kelas III Labuan Bajo (Draft Perjanjian KSP sesuai Nota Dinas No. 82/BU/IX/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Persetujuan KSP antara KSOP Kelas III Labuhan Bajo dengan PT.Pelindo III) dan KSP di KSOP Kelas IV Waingapu (menunggu penilaian aset dari Kementerian Keuangan) sehingga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan persentase pencapaiannya sebesar 100%.

**Grafik III.3.11**  
**Jumlah KSP Yang Dilaksanakan**





- b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11)**  
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11) realisasi kinerja terhadap target kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 mencapai target 100%.

Tabel III.3.35

**Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas (11)**

IKK (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2021	IKK (TAHUN 2021)	SATUAN TAHUN 2021	KRITERIA	TAHUN	
					2020	2021
Jumlah KSP Yang Dilaksanakan	Jumlah	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	Target	2	3
				Realisasi	2	3
				Kinerja (%)	100	100

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KSP Yang Dilaksanakan (IKK 11)**

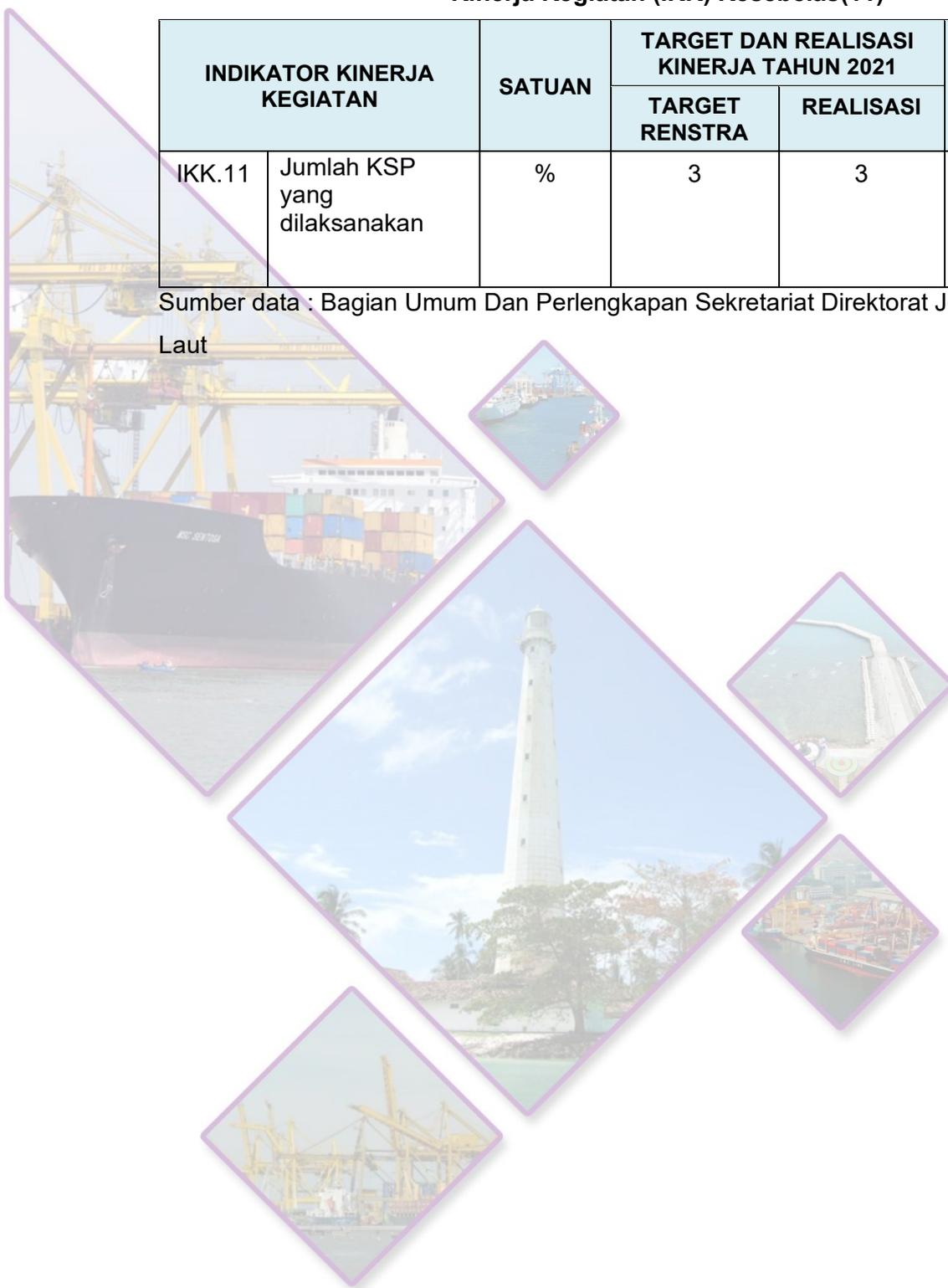
Indikator Kinerja (IKK) Kesebelas (11) ”**Jumlah KSP yang dilaksanakan**” pada Tahun 2021 terdapat realisasi kinerja 3 Jumlah KSP yang dilaksanakan sedangkan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 3 Jumlah Jumlah KSP yang dilaksanakan dan persentase pencapaiannya sebesar 100% sehingga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



**Tabel III.3.36**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesebelas(11)**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKK.11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	%	3	3	100

Sumber data : Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





## III.4 ANALISA EFISIENSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA

Tabel III.4.1

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	9	0	-	-	-	-
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	889	Meningkatkan jumlah peserta diklat yang lulus dan bersertifikat	<b>Pagu awal :</b> 244.800.000 <b>Pagu akhir</b>	3.360.204.000	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-



	IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	82	Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 200.000.000 <b>Pagu Akhir =</b> 190.000.000	200.000.000	-
						Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 500.000.000 <b>Pagu Akhir =</b> 544.575.000	544.575.000	-
						Workshop Pengelolaan TIK Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 455.000.000 <b>Pagu Akhir =</b> Anggaran di Revisi ke Kegiatan Maintenance Sistem Ditjen Hubla	-	-



						Maintenance Portal Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 100.000.000 <b>Pagu Akhir =</b> 95.000.000	93.775.000	-
						Maintenance Server Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 100.000.000 <b>Pagu Akhir =</b> 95.000.000	94.050.000	-
						Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 156.810.000 <b>Pagu Akhir =</b> 156.810.000	152.900.000	-
						Maintenance System Informasi Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 400.000.000 <b>Pagu Akhir =</b> 821.375.000	820.987.640	-



							Pengadaan Server Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal</b> = 1.750.000.000 <b>Pagu Akhir</b> = 1.620.880.000	1.599.817.641	
							Pembuatan Modul Billing System pada Aplikasi SEHATI	<b>Pagu Awal</b> = 2.000.000.000 <b>Pagu Akhir</b> = 1.941.309.000	1.926.309.000	
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	4	Survey Kepuasan Atas Informasi Kehumasan	-	-	-
							Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal</b> = 900.000.000 <b>Pagu Akhir</b> = Terkena Penghematan	-	-
							Monitoring PPID	<b>Pagu Awal</b> = 250.000.000	207.304.900	-



							00 <b>Pagu Akhir</b> 280.000.000			
						Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal</b> = 900.000.000 <b>Pagu Akhir</b> = Terkena Penghematan	-	-	
						Bimbingan Teknis TIM Media Sosial Ditjen Hubla	<b>Pagu Awal</b> 900.000.000 <b>Pagu Akhir</b> 800.000.000	736.631.000		
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	12	27	Menyusun Naskah kesepakatan bersama dan atau Perjanjian Kerjasama	Pagu Awal : 531.425.000 Pagu Akhir : 574.887.000	574.841.460	-
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	75,92		-	-	-



		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	2,96		-	-	-
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98	96,29	Mengusulkan Penetapan PPK dan PPSPM Kantor Pusat Ditjen Hubla Ke KPA dan Mengusulkan Penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Ditjen Hubla Ke Sesditjen Hubla	<b>Pagu Awal =</b> 295.440.000 <b>Pagu Akhir =</b> 295.440.000	295.440.000	
							Meneliti Kembali Kegiatan2 yang tercantum dalam DIPA / POK Ta 2020 dan Menelaah Kembali Data Dukung Kegiatan Yang Akan Dilelangkan	<b>Pagu Awal =</b> 2.423.014.000 <b>Pagu Akhir =</b> 2.584.014.000	2.577.770.419	



							Berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik serta Dokumen Terkait Lainnya			
							Menetapkan Kegiatan2 Strategis Ta. 2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Dimaksud	<b>Pagu Awal =</b> 5.140.427.000 <b>Pagu Akhir =</b> 6.537.789.000	6.374.576.230	
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	10	23	Menetapkan Rancangan dan peraturan yang ditetapkan	<b>Pagu Awal :</b> 321.775.000 <b>Pagu Akhir :</b> 1.196.343.000	1.195.146.850	-



							Sosialisasi Permen dan PP	<b>Pagu Awal :</b> 2.497.260.000 <b>Pagu Akhir :</b> 953.642.000	951.243.880	
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Jumlah	10	10	-	-	-	-
		IKK11	Jumlah KSP yang Dilaksanakan	Jumlah	3	3	-	-	-	-





### III.5 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2021 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.5.1**  
**Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 (Posisi 31 Desember 2021(*unaudited*))**

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Belanja Pegawai	123.090.321.000	104.488.933.000	104.479.033.666
2	Belanja Barang	281.851.743.000	177.447.231.000	176.008.543.589
3	Belanja Modal	32.528.245.000	29.496.547.000	29.377.586.499
	<b>TOTAL PAGU</b>	<b>437.470.309.000</b>	<b>311.432.711.000</b>	
	<b>TOTAL REALISASI</b>			<b>309.865.163.754</b>
	<b>TOTAL SISA DANA</b>			<b>1.567.547.246</b>

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (diakses pada tanggal 25 Januari 2022)





# BAB IV

## PENUTUP

### SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2021

#### III.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1) **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 9%. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II belum terdapat realisasi, dikarenakan penerimaan CPNS untuk tahun 2021 Kementerian Perhubungan masih menunggu informasi dari Kemenpan RB sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 0%, sedangkan untuk Triwulan III mengusulkan 1.197 penambahan CPNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan yang lulus sampai dengan seleksi akhir sebanyak 118 CPNS sehingga prosentase pada Triwulan III sebesar 10% dari jumlah Pegawai Tahun 2021 sebanyak 13.310 dan belum mencapai target hal ini dikarenakan Kondisi Keuangan Negara dan Kebijakan Kemenpan RB.

##### 2) **Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut**

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar 1.900 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 298 Sertifikat, Triwulan II terdapat realisasi sebesar 388 Sertifikat dan Triwulan III terdapat realisasi sebesar 506 Sertifikat dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 889 Sertifikat sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 46.79% belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pemotongan anggaran dan adanya Pergub DKI No.106 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Ibu Kota sehingga berpengaruh kepada pembatasan pelaksanaan Diklat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**3) Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut**

Adapun Sesuai dengan target tahun 2021 82% dengan nilai rata-rata kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebesar 90%, sedangkan pada Triwulan IV sebesar 82% sehingga persentase Kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100% sistem bisa/dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu.

**4) Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan**

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebesar Skala 4 dari 5 skala berdasarkan model perhitungan yang dibuat. Terlihat pada Triwulan I tercapai hasil perhitungan pada Skala 3 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sedangkan Pada Triwulan II dan Triwulan III dan Triwulan IV tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi

**5) Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut**

Sesuai dengan target tahun 2021 sebanyak 12 Perjanjian Kerjasama. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 6 Perjanjian Kerja Sama dan Pada Triwulan II terdapat realiasi sebesar 8 Perjanjian Kerja Sama, sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 66,67%. dan pada Triwulan III terdapat tambahan 3 Perjanjian sehingga total menjadi 11 Kerjasama sehingga persentase pencapaian terhadap target 91,66 % sedangkan untuk Triwulan IV terdapat 27 perjanjian sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 255 %.

**6) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut**

Untuk Tahun 2021 target dari Nilai AKIP sebesar 85 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan III belum terdapat realisasi, dan untuk Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 75,92, sehingga prosentase Kinerja sebesar 89,32%.

**7) Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut**

- 8) Untuk Tahun 2021 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan III belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 2,96.

### 9) Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 93,98%. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 12,09%, pada Triwulan II terdapat realisasi anggaran sebesar 31,63%, pada Triwulan III terdapat realisasi anggaran sebesar 52,79%, dan pada Triwulan IV terdapat realisasi anggaran sebesar 96,29%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target kinerja sebesar 102,46%.

### 10) Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebanyak 10 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 3 Rancangan Peraturan Menteri dan Pada Triwulan II terdapat Realisasi sebesar 21 Rancangan Peraturan Menteri sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 210%, sedangkan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realiasi 3 rancangan sehingga Prosentase pencapaian terhadap target sebesar 230 %.

### 11) Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sejumlah 10 kegiatan (Lokasi). Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sejumlah 3 kegiatan yaitu PSP Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dari 905 Total Kuantitas sudah 809 Kuantitas yang terealisasi atau sekitar 94,85%, KSOP Sunda Kelapa dari 950 Total Kuantitas yang terealisasi 829 Kuantitas yang terealisasi atau sekitar 77,03% dan PSP KSOP Marunda dari 505 Total Kuantitas yang terealisasi 414 Kuantitas atau sekitar 83,29%. Sedangkan pada Triwulan II terdapat tambahan PSP sejumlah 4 kegiatan yaitu PSP KSOP Tanjung Pandan Total yang terealisasi 100%, KUPP Kelas III Manggar Total terealisasi 100%, KUPP Sadai Total terealisasi 100%, sedangkan pada KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun dari Total Kuantitas BMN 1862 yang sudah PSP sekitar 1732 atau sudah terealisasi 97%. Sehingga belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih menunggu surat usulan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pada Triwulan III Pangkalan PLP Kelas II Bitung dari Total BMN dengan Kuantitas 1586 dan Luas 8310 M2 yang telah di PSP kan Kuantitas 1453 dan luas 8310 sekitar 99%. Pada Triwulan ke IV KUPP Kelas III Pulau Bunyu dari Total BMN dengan Kuantitas 149 dan Luas 3508 M2 yang telah di PSP kan dengan Kuantitas 106 dan Luas 2244 m2 sekitar 98.51%, dan KSOP Kuala Tanjung dari Total Kuantitas 1071 dan Luas 12441 m2, BMN yang telah di PSP kan kuantitas 997 dan Luas 12441 m2 atau sekitar 99.43% yang telah di PSP kan.

## 12) Jumlah KSP Yang Dilaksanakan

Adapun sesuai dengan target tahun 2021 sebanyak 3 jumlah. Pada Triwulan I dan Triwulan II belum ada realisasi karena masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan sedangkan pada Triwulan III telah terlaksana pada 1 lokasi KSP di KUPP Kelas III Garongkong (menunggu penilaian aset dari Kementerian Keuangan) sedangkan pada Triwulan IV telah terlaksana pada 2 lokasi KSP di KSOP Kelas III Labuhan Bajo (Draft Perjanjian KSP sesuai Nota Dinas No. 82/BU/IX/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Persetujuan KSP antara KSOP Kelas III Labuhan Bajo dengan PT.Pelindo III) dan KSP di KSOP Kelas IV Waingapu (menunggu penilaian aset dari Kementerian Keuangan) sehingga telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan persentase pencapaiannya sebesar 100%.

## III.2 Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari dukungan jajaran seluruh unit kerja yang ada serta diperlukan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2021**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan memuat beberapa indikator kinerja serta target yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran.

Jakarta,

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**



**ANDI HARTONO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19670521 199703 1 001**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<b>Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut</b>					
SK	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1900
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	84
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala likert	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	16
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	86
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut		3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,15
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	12
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	KSP	6

Jakarta,

**SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**



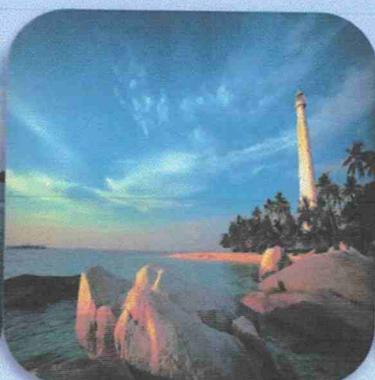
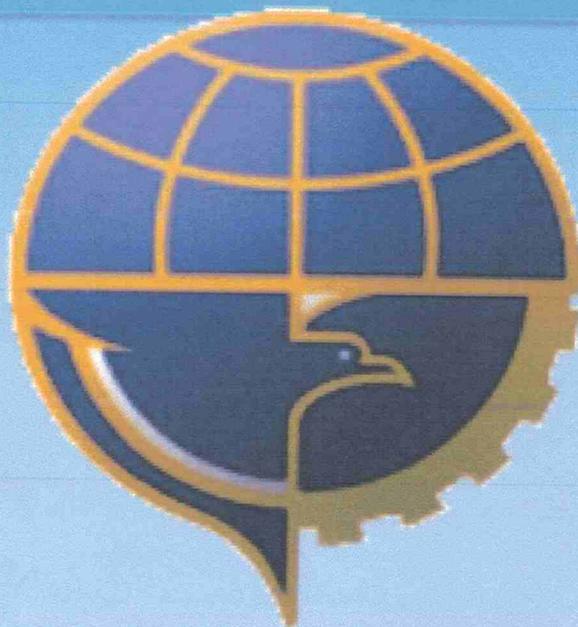
**ANDI HARTONO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670521 199703 1 001



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



**PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT**  
**TAHUN 2021**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**



**ANDI HARTONO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670521 199703 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI HARTONO**  
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**  
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT**

**R. AGUS H. PURNOMO**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT**

**ANDI HARTONO**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19670521 199703 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)		SATUAN (4)	TARGET (5)
<b>Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut</b>					
SK	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1900
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	12
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,15
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	%	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3

Kegiatan Anggaran  
 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut Rp. 437.470.309.000,-

**DISETUJUI**  
  
**DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN LAUT**

  
**R. AGUS H. PURNOMO**

Jakarta, 2021  
**SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN LAUT**

  
**ANDI HARTONO**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19670521 199703 1 001



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



# **REVIU PERJANJIAN KINERJA**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2021**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT**



**ARIF TOHA**

**NIP. 19670320 199203 1 003**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARIF TOHA**  
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIF TOHA**  
Jabatan : **Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

**PIHAK KEDUA**  
**Plt. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT**

**ARIF TOHA**  
**NIP. 19670320 199203 1 003**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT**

**ARIF TOHA**  
**NIP. 19670320 199203 1 003**

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
<b>Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut</b>					
SK	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1900
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	12
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	93,98
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	%	10
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut                | Rp. 21.046.279.000,-  |
| 2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut | Rp. 252.217.657.000,- |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut   | Rp. 21.037.986.000,-  |
| 4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut                        | Rp. 7.628.624.000,-   |
| 5. Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut           | Rp. 9.502.165.000,-   |

Disetujui

Jakarta,

2021

Pit. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT

SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT



**ARIF TOHA**  
NIP. 19670320 199203 1 003



**ARIF TOHA**  
NIP. 19670320 199203 1 003



NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JANUARI				Realisasi Bulan JANUARI		% Capaian Bulan	JANUARI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume		%	%			
		IKK 8	Persentase Daya Serap Dijen Perhubungan Laut	%	96,15	Menunjuk Kepada Kabbag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Mengusulkan penetapan PPK, dan PPSPM Kantor Pusat Dijen Hubla ke KPA - Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran ke Sisdijen Hubla - Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2021 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan diletakkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian - Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan SK Penetapan Bendahara	1	1	100	24.620.000	8.33333	1	24.620.000	100	100			Kabbag Keuangan
																			Subbagian Perbendaharaan
																			Subbagian Anggaran
																			Subbagian Perbendaharaan (Koordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10	Menunjuk Kepada Kabbag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan 2. Sosialisasi Permen, PP.													Kabbag Hukum dan KLSN
																			Sub Bagian Peraturan
																			Dua kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di bulan
																			Sub Bagian Advokasi dan Peradilan Nasional
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Dijen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu													Kabbag Umum dan Perlengkapan
																			Pada bulan Januari belum terdapat capaian kinerja kegiatan PSP yang terealisasi
		IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada													Kabbag Umum dan Perlengkapan
																			Belum ada realisasi kegiatan KSP, Masih dalam Proses

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2021**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan FEBRUARI				Realisasi Bulan FEBRUARI		% Capaian Bulan FEBRUARI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
SP.1	Tertaksannya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK.1 Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I); 2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari; 3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (Tahun);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			Kabag Kepegawaian
		IKK.2 Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabag Kepegawaian - Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	Anggaran BP2TL	90 peserta lulus diklat dan bersertifikat			0,047			mengalokasikan peserta yang belum terpagang untuk ikut diklat di bulan berikutnya		
		IKK.3 Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi 1. Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla 2. Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla 3. Workshop Pengelolaan TIK 4. Maintenance Portal Ditjen Hubla 5. Maintenance Server Ditjen Hubla 6. Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla 7. Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla 8. Pengadaan Server Ditjen Hubla 9. Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sehat	Menyampaikan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla Membangun mobile Portal Hubla Maintenance Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehat, Sirani dan Portal Hubla Diklat Sistem Analisis untuk SDM Ditjen Hubla Pembelian Perangkat Keras (Server) Membangun Blanko Sistem	2 5 2 1 1 1 2 1 1	0 1 0 0 0 0 0 0 0	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	0 500.000.000 445.000.000 100.000.000 100.000.000 156.810.000 400.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 70.194.000 0 0 0 0 0 0 0	0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi	dilakukan di semester II dilakukan dibulan Juni dan Agustus dilakukan dibulan Juli s.d September dilakukan dibulan Juli s.d September dilakukan dibulan Juni	Subbag Datim Hubla Subbag Datim Hubla	Kabag Kepegawaian Kepada Kabag Organisasi dan Humas
		IKK.4 Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Survey Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/kehumasan 2. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla 3. Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla 5. Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla	4 1 3 1 1	0 0 1 0 0	0% 0% 100% 0% 0%	0 900.000.000 200.000.000 900.000.000 900.000.000	0% 0% 100% 0% 0%	0 0 1 0 0	0 0 151.435.900 0 0	0% 0% 33% 0% 0%	0% 0% 75% 0% 0%		Dilaksanakan Bulan Maret 2021 Dilaksanakan Bulan Juli 2021 Terkena Penghematan Anggaran Rp. 30.000.000 Dilaksanakan Pembahasan Kesiapan Penerapan Aplikasi Si Dilaksanakan Bulan Juli 2021 Dilaksanakan Bulan April 2021	Sub Bagian Humas Sub Bagian Humas Sub Bagian Humas Sub Bagian Humas Sub Bagian Humas	Kepada Kabag Organisasi dan Humas	
		IKK.5 Diepakainya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian		12	12	100%	531.425.000	100%	0	0	0,00	0			Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
		IKK.6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait - Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Ditjen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	4.721.809.000	100%	1	130.380.000	100%	3%		1. Kegiatan Penunjang : Penyusunan Dokumen SAKIP dan Draft Final LKP 2. Kegiatan penunjang lainnya yaitu kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I dan II Th 2021 dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Eselon I dan II Th 2021 di Lingkungan Ditjen Hubla	Kabag Perencanaan	
		IKK.7 Nilai Maturlitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0	Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait		Kabag Perencanaan	

				- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem Pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik risiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPiP bagi Pemilik Risiko dan terciptanya pemahaman perubahan dokumen risiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPiP bagi Pemilik Risiko dan terciptanya pemahaman perubahan dokumen risiko	1	100%	177.491.000	100%	0	0	0	0	0	Refocusing Anggaran TA. 2021	
				- Penilaian tingkat maturitas SPiP	Tercapainya Nilai Maturitas SPiP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	Tercapainya Nilai Maturitas SPiP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	Refocusing Anggaran TA. 2021	
IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,15	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabag Keuangan
				- Mengusulkan penetapan PPK dan PPSM Kantor Pusat Ditjen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Pembendaharaan												Subbagian Pembendaharaan
				- Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Ditjen Hubla ke Sesi Ditjen Hubla	SK Penetapan Bendahara	-	-	-	24.620.000	8,33	-	24.620.000	-	100			
				- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan dihilangkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik, serta dokumen terkait lainnya	Kegiatan dalam DIPA dan data dukung yang telah dievaluasi												Subbagian Anggaran
				- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan												Subbagian Pembendaharaan (Kordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi
							3	3	100	585.000.000	24,14	3	553.499.000	100	94,62		
							5	5	100	945.000.000	18,38	5	917.793.000	100	97,12		
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabag Hukum dan KLSN
				1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan			10	0	100%	321.775.000	100%	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Maret 2021	Sub Bagian Peraturan
				2. Sosialisasi Permen, PP,			2	2	0	1.983.120.000	100%	0	0	0	0	Terkena Penghematan Anggaran sebesar Rp514.140.000,-	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional
IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabag Umum dan Perengkapan
				- Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu				1	0		1	0	1	0	terdapat 1 kegiatan PSP OP Tanjung Priok sudah terealisasi 80% dari 905 atau sekitar 94,85 %		Kabag Umum dan Perengkapan
IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabag Umum dan Perengkapan
				- Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada				0	0		0	0	0	0	Belum ada yang terealisasi masih dalam tahap pemrosesan		





**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :                      APRIL                      TAHUN :                      2021**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan APRIL				Realisasi Bulan APRIL		% Capaian Bulan APRIL		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab		
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
SP.1	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	KK 1 Peningkatan alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:  1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Mengan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I);  2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari;  3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun);														Kabag Kepegawaian	
						0	0	0		0				0%	0%					
							0	0		0				0%	0%	0	Tidak terlaksana karena Anggaran kegiatan tidak ada. Sampai dengan bulan Agustus 2020 masi dalam tahap seleksi penerimaan cpns 2019			
						Surat usulan dari UPT ke Kantor Pusat Bagian Kepegawaian	25 usulan	0		0				0%	0%	monitor pergerakan pegawai yang	Update Rekapitan Usulan Kebutuhan Pegawai			
		KK 2 Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat														Kabag Kepegawaian	
						Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	Anggaran BP2TL		120 peserta lulus diklat dan bersertifikat			0,06		mengalokasikan peserta yang belum terpanggil untuk ikut diklat di bulan berikutnya			
		KK 3 Peningkatan kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi														Kepada Kabag Organisasi dan Humas	
						1 Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Menyapkan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla	2	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan di semester II	Subbag Datin Hubla	
						2 Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem	5	0	100%	500.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla	
						3 Workshop Pengelolaan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla	2	0	100%	445.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juni dan Agustus	Subbag Datin Hubla	
						4 Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla	
						5 Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehat,	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla	
						6 Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Ditjen Hubla	1	0	100%	156.810.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juni	Subbag Datin Hubla	
						7 Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Peningkatan modul Penilaian Beban Kerja dan Standar Kinerja Ditjen Perhubungan Laut	2	0	100%	400.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla	
						8 Pengadaan Server Ditjen Hubla	Pembelian Perangkat Keras (Server)	1	0	100%	1.750.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla	
						9 Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sehat	Membangun Blanko Sistem	1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d Nopember	Subbag Datin Hubla	
		KK 4 Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabag Organisasi dan Humas	
						1 Survey Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/kehumasan		4	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%			Dilaksanakan Bulan Juni 2021	Sub Bagian Humas
						2 Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%			Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas
						3 Monitoring PPIID		3	0	0%	200.000.000	0%	0	0	0%	0%			Telah Dilaksanakan Pembahasan Kesepakatan Penerapan Aplikasi Si Doel Pada PPIID Pelaksana Kantor Pusat tanggal 18 - 21 Februari 2021	Sub Bagian Humas
						4 Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%			Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas
						5 Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla		1	1	100%	800.000.000	100%	1	196.131.000	25%	25%			Terkena Penghematan Anggaran Rp. 100.000.000	Sub Bagian Humas
																		Telah Dilaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Kegiatan		
		KK 5 Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal - Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama														Kabag Hukum dan KLSN	
							12	12	100%	531.425.000	100%	1	0	8%	0%				Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
		KK 6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal - Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait														Kabag Perencanaan	
							1	1	100%	4.682.224.000	100%	1	140.789.000	100%	3%					

				- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Dijen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0		Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait	
KK 7	Nilai Maturitas SPIP Dijen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal													Kabag Perencanaan
				- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	1	100%	445.390.000	100%	0	0	0	0		Revisi Anggaran (adanya penambahan anggaran)	
				- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	0	100%	0	0	0	0	0	0		Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021 akan dilaksanakan dengan metode penilaian yang baru dan masih menunggu keabsahan SKPK	
KK 8	Persentase Daya Serap Dijen Perhubungan Laut	%	96,15	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabag Keuangan
				- Mengusulkan penetapan PPK dan PPSPM Kantor Pusat Dijen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan SK Penetapan Bendahara				24.620.000	8,33	-	24.620.000	-	100			Subbagian Perbendaharaan
				- Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Dijen Hubla ke Sesi Dijen Hubla													
				- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPAPOK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan dielakkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik, serta dokumen terkait lainnya	Kegiatan dalam DIPA dan data dukungnya yang telah diteliti				785.125.000	32,40	3	755.287.000	100	96,20			Subbagian Anggaran
				- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan				185.000.000	3,60	5	169.780.000	100	91,77			Subbagian Perbendaharaan (Kordinator) Subbagian Anggaran

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :                      MEI                      TAHUN :                      2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan MEI				Realisasi Bulan MEI		% Capaian Bulan MEI		Evaluasi				
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran			Capaian Kinerja		Capaian Anggaran	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%		%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
SP.1	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemengan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I);	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
						2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari;	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%					
							3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun);	Surat usulan dari UPT ke Kantor Pusat Bagian Kepegawaian	25 usulan	0	0	0	0	0	0	0%	0%	monitor pergerakan pegawai yang pindah, promosi dan peninggal		
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk - Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	Anggaran BP2TL	120 peserta lulus diklat dan bersertifikat			0,06					
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
						- Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi														
						1. Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Menyiapkan Laporan Semester	2	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
						2. Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi	5	0	100%	500.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
						3. Workshop Peneloalan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT	2	0	100%	445.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
						4. Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
						5. Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehati, Sirani dan Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
						6. Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Datin Hubla	1	0	100%	156.810.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
						7. Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Pengembangan modul Penilaian Beban Kerja dan Standar Kinerja	2	0	100%	400.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			
		8. Pengadaan Server Ditjen Hubla	Pengembangan dan Rehabilitasi UPT	1	0	100%	1.750.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi							
9. Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sehati	Pembelian Perangkat Koras (Server)	1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi									
					Membangun Blanko Sistem		1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi				
IKK 4	Kepuasan publik atas layanan/informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					1. Survey Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan		4	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%					
					2. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%					
					3. Monitoring PPIID		3	0	0%	200.000.000	0%	0	0	0%	0%					
					4. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%					
					5. Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla		1	0	0%	800.000.000	0%	0	0	0%	0%					
IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					- Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama		12	12	100%	394.887.00	100%	0	71.120.000	0%	18%					
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
					- Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	4.682.224.000	100%	1	146.334.000	100%	3%					

					- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Diijen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0	
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Diijen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
				- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Tertaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	Tertaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	1	100%	445.390.000	100%	0	0	0	0	0	0
				- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 8	Persentase Daya Serap Diijen Perhubungan Laut	%	96,15	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
				- Mengusulkan penetapan PPK, dan PPSPM Kantor Pusat Diijen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan SK Penetapan Bendahara	-	-	-	24.620.000	8,33	-	-	24.620.000	-	100	
				- Mengusulkan penetapan												
				- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA 2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan diluncurkan berupa Kerangka	Kegiatan dalam DIPA dan data dukungnya yang telah diteliti		1	1	100	120.000.000	4,95	1	84.470.000	100	70,39	
				- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA 2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan		5	5	100	630.000.000	12,26	5	626.730.380	100	99,48	
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
				1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan			10	21	50%	1.571.775.000	100%	21	216.900.000	100%	14%	Target Kinerja mengalami kenaikan 2 x lipat dari yang sebelumnya 10 RPM menjadi 21 RPM. (Persentase kinerja 200%)
				2. Sosialisasi Permen, PP,			2	2	100%	1.708.393.000	100%	0	0	0	0	
IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Pemasalahan BMN Diijen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
				- Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu			0		0			0	0	0	0	0
IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												
				- Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada			0		0			0	0	0	0	0

Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
(18)	(19)
	Kabbag Kepegawaian
Tidak terlaksana karena : Anggaran kegiatan tidak ada. Sampai dengan bulan Agustus 2020 masih dalam tahap seleksi penerimaan <del>2020</del> 2019.	
Update Rekapitan Usulan Kebutuhan Pegawai	
	Kabbag Kepegawaian
mengalokasikan peserta yang belum terpanggil untuk ikut diikut di bulan berikutnya	
	Kepada Kabbag Organisasi dan Humas
diadakan di semester II	Subbag Datin Hubla Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juni dan Agustus	Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juni	Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla
diadakan dibulan Juli s.d <del>September</del> <del>November</del>	Subbag Datin Hubla
	Kepada Kabbag Organisasi dan Humas
Dilaksanakan Bulan Juni 2021	Sub Bagian Humas
Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas
Telah Dilaksanakan Pembahasan Kesiapan Penerapan Aplikasi Si Doel	Sub Bagian Humas
Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas
Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas
	Kabbag Hukum dan KLSN
Dilakukan Revisi Anggaran. Naskah belum final dan masih perlu pembahasan kembali.	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional
	Kabbag Perencanaan

Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait	
	Kabbag Perencanaan
Pelaksanaan Bimtek SPIP untuk Tahun 2021 masih menunggu jadwal karena adanya perubahan sistem penilaian SPIP yang baru	
Penilaian Maturlas SPIP Tahun 2021 akan dilaksanakan dengan metode penilaian yang baru dan masih menunggu konfirmasi BPKP	
	Kabbag Keuangan
	Subbagian Perbendaharaan
	Subbagian Anggaran
	Subbagian Perbendaharaan (Kordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi
	Kabbag Hukum dan KLSN
Ada peningkatan kinerja, penambahan anggaran karena target kinerjanya meningkat, maka dilakukan lah revisi anggaran. Tereaksikannya 21 RPM tindak lanjut dari PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dalam kerangka implementasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja	Sub Bagian Peraturan
Telah dilaksanakan 1 kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi PP dan untuk sosialisasi PM akan dilaksanakan pada bulan	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional
	Kabbag Umum dan Perengkapan
untuk bulan Mei usulan PSP belum ada yang terealisasi	
	Kabbag Umum dan Perengkapan
Belum ada yang terealisasi masih dalam tahap pemrosesan	

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :** JUNI **TAHUN :** 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Target Bulan JUNI				Realisasi Bulan JUNI		% Capaian Bulan JUNI		(17)	(18)	(19)			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja %	Capaian Anggaran %						
								(9)	(10)	(11)	(12)								(13)	(14)	(15)
SP.1	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemengan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Kepegawaian	
					1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I);	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%							
					2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari;		0	0	0	0	0	-	0%	0%			Tidak terlaksana karena : Anggaran kegiatan tidak ada. Sampai dengan bulan Agustus 2020 masi dalam tahap seleksi penerimaan cpns 2019				
					3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun);	Surat usulan dari UPT ke Kantor Pusat Bagian Kepegawaian	25 usulan	0	0	0	0	-	0%	0%	monitor pergerakan pegawai yang pindah, promosi dan meninggal		Update Rekapom Usulan Kebutuhan Pegawai				
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Kepegawaian	
					- Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	1.Anggaran BP2TL 2.Anggaran djpi Rp 2448000000.	60 peserta lulus diklat dan bersertifikat		0,031	100%			1.Anggaran BP2TL 30 peserta 2.Anggaran djpi 30 peserta Rp 244800000. 3.mengalokasikan peserta yang belum				
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabag Organisasi dan Humas	
					- Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi																
					1 Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Menyapkan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla	2	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan di semester II			Subbag Datin Hubla	
					2 Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi	5	0	100%	500.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi				Subbag Datin Hubla	
					3 Workshop Pengelolaan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla															Anggaran di alihkan/revisi ke giatan no 7
					4 Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September			Subbag Datin Hubla	
					5 Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehat, Sirani	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September			Subbag Datin Hubla	
					6 Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Datin Hubla	1	1	100%	156.810.000	100%	1	156.810.000	100%	100%	Koordinasi	Sudah Terealisasi			Subbag Datin Hubla	
					7 Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Pengembangan Modul SIRANI (Pengembangan modul Penilaian Beban Kerja dan Standar Kinerja Pelayanan dan Pelabuhan UPT Ditjen Hubla)	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September			Subbag Datin Hubla	
						Pengembangan Layanan Kepelabuhan	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September			Subbag Datin Hubla	
						Perubahan SEHATI terkait Penyesuaian Perubahan OSS RBA	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September			Subbag Datin Hubla	
					8 Pengadaan Server Ditjen Hubla	Pembelian Perangkat Keras (Server)	1	0	100%	1.750.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September			Subbag Datin Hubla	
					9 Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sabot	Membangun Blanko Sistem	1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d Nopember			Subbag Datin Hubla	
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabag Organisasi dan Humas	

				1	Survey kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan			4	1	100%	0	0%	1	0	25%	0%		Telah Dilaksanakan Bulan Juni 2021	Sub Bagian Humas	
				2	Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla			1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%		Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas	
				3	Monitoring PPID			3	0	0%	200.000.000	0%	0	0	0%	0%		Telah Dilaksanakan Pembahasan Kesiapan Penerapan Aplikasi Si Doel Pada PPID	Sub Bagian Humas	
				4	Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla			1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%		Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas	
				5	Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla			1	0	0%	800.000.000	0%	0	0	0%	0%		Dilaksanakan Bulan Juli 2021	Sub Bagian Humas	
IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12		Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Hukum dan KLSN	
					- Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama			12	12	100%	394.887.00	100%	0	0	0	0			Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85		Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan	
					- Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait			0	0	100%	4.682.224.000	100%	0	0	0%	0%				
					- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Ditjen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait			1	1	100%	0	0	1	0	100%	0		Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait		
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3		Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan	
					- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	1	100%		445.390.000	100%	0	0	0	0		Pelaksanaan Bimtek SPIP untuk Tahun 2021 masih menunggu jadwal karena adanya perubahan sistem penilaian SPIP yang baru		
					- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terddefinisi)	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terddefinisi)	0	100%		0	0	0	0	0	0		Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021 akan dilaksanakan dengan metode penilaian yang baru dan masih menunggu		
IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,15		Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Keuangan	
					- Mengusulkan penetapan PPK, dan PPSM Kantor Pusat Ditjen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan														Subbagian Perbendaharaan
					- Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Ditjen Hubla ke Sesdijen Hubla	SK Penetapan Bendahara					24.620.000	8,33			24.620.000		100			
					- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan dilelangkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik, serta dokumen terkait lainnya	Kegiatan dalam DIPA dan data dukungnya yang telah diteliti					210.000.000	8,67	2		209.828.000	100	99,92		Subbagian Anggaran	
					- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan					552.000.000	10,74	5		551.785.000	100	99,96		Subbagian Perbendaharaan (Kordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi	
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/ revisi/rafikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10		Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Hukum dan KLSN	
					1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan			10	21	50%	1.571.775.000	100%	0		282.390.000	0	18%		Target Kinerja mengalami kenaikan 2 x lipat dari yang sebelumnya 10 RPM menjadi 21 RPM. (Persentase kinerja 200%)	Sub Bagian Peraturan

					2. Sosialisasi Permen, PP.		2	2	100%	1.708.393.000	100%	0	0	0	0		Telah dilaksanakan 1 kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi PP dan untuk sosialisasi PM akan dilaksanakan pada bulan Oktober.	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
			IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Diijen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perlekapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											Kabbag Umum dan Perlekapan	
							- Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu					3	0	3	0	3	-	KUPP kelas III Manggar telah terealisasi kegiatan PSP 100%, KUPP Sadai terealisasi kegiatan PSP 100% dan KSOP kelas I Tanjung Balai Karimun telah terealisasi 97%	
			IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perlekapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:											Kabbag Umum dan Perlekapan	
							- Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada					0	0	0	0	0	-	Belum ada yang terealisasi masih dalam tahap pemrosesan	

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

BULAN :                      JULI                      TAHUN :                      2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan JULI				Realisasi Bulan JULI		% Capaian Bulan JULI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab			
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran						
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
SP.1	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1 Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemempn RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Kepegawaian		
					1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I);	0	0	0					0	-	0%	0%					
					2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari;		0	0					0	-	0%	0%	0	Tidak terlaksana karena : Anggaran kegiatan tidak ada. Sampai dengan bulan Agustus 2020 masi dalam tahap seleksi penerimaan cpns 2019			
					3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun);	Surat usulan dari UPT ke Kantor Pusat Bagian Kepegawaian	25 usulan	0					0	-	0%	0%	monitor pergerakan pegawai yang pindah, promosi dan meringgal	Update Rekapian Usulan Kebutuhan Pegawai			
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabbag Kepegawaian
		- Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	Anggaran BP2TL	120 peserta lulus diklat dan bersertifikat						0,047		mengalokasikan peserta yang belum terpanggil untuk ikut diklat di bulan berikutnya					
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabbag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kepada Kabbag Organisasi dan Humas
		- Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi																			
		1	Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Menyiapkan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla	2	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan di semester II	Subbag Datin Hubla					
		2	Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi	5	0	100%	500.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla					
3	Workshop Pengelolaan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla												Anggaran di alihkan/revisi ke giatan no.7	Subbag Datin Hubla						
4	Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla							
5	Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance. Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehati, Sirani dan Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September	Subbag Datin Hubla							
6	Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Datin Hubla	1	0	100%	156.810.000	100%	0	0	100%	100%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla							
7	Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Pengembangan Modul SIRANI (Pengembangan modul Penilaian Beban Kerja dan Standar Kinerja Pelayanan dan Pelabuhan UPT Ditjen Hubla)	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development	Subbag Datin Hubla							
		Pengembangan Layanan Kepelabuhanan	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development	Subbag Datin Hubla							

					Perubahan SEHATI terkait Penyesuaian Perubahan OSS RBA	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development	Subbag Datin Hubla
			8	Pengadaan Server Ditjen Hubla	Pembelian Perangkat Keras (Server)	1	0	100%	1.750.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Menunggu E-Katalog	Subbag Datin Hubla
			9	Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sahati	Membangun Blanko Sistem	1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Persiapan Lelang	Subbag Datin Hubla
IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabbag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kepada Kabbag Organisasi dan Humas
			1	Survey kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan		4	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%		Dilaksanakan Bulan September 2021	Sub Bagian Humas
			2	Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla		1	1	100%	900.000.000	100%	0	0	0%	0%		Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas
			3	Monitoring PPID		3	0	0%	200.000.000	0%	0	0	0%	0%		Telah Dilaksanakan Pembahasan Kesiapan Penerapan Aplikasi Si Doel Pada PPID Pelaksana Kantor Pusat tanggal 18 - 21 Februari 2021	Sub Bagian Humas
			4	Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla		1	1	100%	900.000.000	100%	0	0	0%	0%		Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas
			5	Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla		1	1	100%	800.000.000	100%	1	166.500.000	25%	21%		Telah Dilaksanakan Forum SMRT Session I tanggal 28 Juli 2021	Sub Bagian Humas
																Belum Ada Realisasi Pembayaran	
IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12	Menunjuk Kepada Kabbag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Hukum dan KLSN
				- Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama		12	12	100%	394.887.00	100%	1	0	8%	0			Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85	Menunjuk Kepada Kabbag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Perencanaan
				- Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		0	0	100%	4.824.304.000	100%	0	0	0%	0%			
				- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Ditjen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0		Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait	
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabbag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Perencanaan
				- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Terteksa Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	1	100%	349.630.000	100%	0	0	0	0		Revisi Anggaran		
				- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	0	100%	0	0	0	0	0	0			Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021 akan dilaksanakan dengan metode penilaian yang baru dan masih menunggu konfirmasi BPPK	

IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	96,15	Menunjuk Kepada Kabbag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Keuangan			
				- Mengusulkan penetapan PPK dan PPSPM Kantor Pusat Ditjen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan																Subbagian Perbendaharaan
				- Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Ditjen Hubla ke Seditjen Hubla	SK Penetapan Bendahara	-	-	-	24.620.000	8,33	-	24.620.000	-	100							
				- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan dilelangkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik, serta dokumen	Kegiatan dalam DIPA dan data dukungnya yang telah diteliti	0	0	0	-	0,00	0	-	0	0,00							
- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Subbagian Perbendaharaan (Koordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi			
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut.	Jumlah	10	Menunjuk Kepada Kabbag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Hukum dan KLSN			
				1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan		10	21	50%	1.571.775.000	100%	0	712.000.000	0	18%					Sub Bagian Peraturan		
				2. Sosialisasi Permen, PP,		2	2	100%	1.708.393.000	100%	0	0	0	0		telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi PP dan untuk sosialisasi PMakan		Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional			
IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Umum dan Perengkapan			
				- Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu			1		0		1	0	1			Pangkalan PLP Kelas II Bitung dari Total BMN dengan Kuantitas 1586 dan Luas 8310 M2 yang telah di PSP kan Kuantitas 1453 dan Luas 8310 sekitar 90%					
IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Umum dan Perengkapan			
				- Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada			0		0		0	0	0			Belum terealisasi masih dalam proses					

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN :                      AGUSTUS                      TAHUN :                      2021**

(1)	NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan AGUSTUS				Realisasi Bulan AGUSTUS		% Capaian Bulan AGUSTUS		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab				
									Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran							
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%							
	SP.1	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	%	9	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Kepegawaian			
						1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I);	0	0	0	-	0	-	0%	0%									
						2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari;	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0		0	0%	0%	0	Tidak terlaksana karena : Anggaran kegiatan tidak ada. Sampai dengan bulan Agustus		
						3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun);	Surat usulan dari UPT ke Kantor Pusat Bagian Kepegawaian	25 usulan	0	0	-	0	-	0%	0%	0		0	0%	0%	0	monitor penerangan pegawai yang pindah, promosi	Update Rekapitan Usulan Kebutuhan Pegawai
			IKK 2	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabbag Kepegawaian			
						- Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	Anggaran BP2TL	30 peserta lulus diklat dan bersertifikat		0,015							mengalokasikan peserta yang belum terpanggil untuk ikut diklat di bulan berikutnya		
			IKK 3	%	82	Menunjuk Kepada Kabbag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabbag Organisasi dan Humas			
						1. Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi	Menyapkan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla	2	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan di semester II		Subbag Datin Hubla			
						2. Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Penjelasan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi	5	0	100%	500.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi			Subbag Datin Hubla			
						3. Workshop Pengelolaan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla												Anggaran di alihkan/revisi ke giatan no. 7	Subbag Datin Hubla			
						4. Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September		Subbag Datin Hubla			
						5. Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehati, Sirani dan Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	dilakukan dibulan Juli s.d September		Subbag Datin Hubla			
						6. Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Datin Hubla	1	0	100%	156.810.000	100%	0	0	100%	100%	Koordinasi	Sudah Terealisasi		Subbag Datin Hubla			
						7. Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Pengembangan Modul SIRANI, Pengembangan Layanan Kepelabuhanan, Perubahan SEHATI terkait Penyesuaian OSS RBA (Pengembangan modul Penilaian Beban Kerja dan Standar Kinerja Pelayanan dan Selektabilitas UPT Ditjen Hubla)	3	1	100%	650.000.000	100%	0	200.000.000	30,77	30,77	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development		Subbag Datin Hubla			
						8. Pengadaan Server Ditjen Hubla	Pembelian Perangkat Keras (Server)	1	0	100%	1.750.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Menunggu E-Katalog		Subbag Datin Hubla			
						9. Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sehati	Membangun Blanko Sistem	1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Persiapan Lelang		Subbag Datin Hubla			
			IKK 4	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabbag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabbag Organisasi dan Humas			
						1. Survey kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan		4	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%					Dilaksanakan Bulan September 2021	Sub Bagian Humas	
						2. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla		1	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%					Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas	
						3. Monitoring PPID		3	1	100%	200.000.000	100%	1	18.915.000	33%	9%					Telah Dilaksanakan Perjalanan Dinas Bulan Agustus 2021	Sub Bagian Humas	
						4. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla		1	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%					Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas	

				5	Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Dijen Hubla		1	1	100%	800.000.000	100%	1	200.000.000	25%	25%		Telah Dilaksanakan Forum SMRT Session II tanggal 25 Agustus 2021	Sub Bagian Humas	
IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12		Menunjuk Kepada Kabbag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Hukum dan KLSN	
					- Menyusun naskah kesepakatan bersama dan alau perjanjian kerjasama		12	12	100%	394.887.000	100%	10	0	83%	0			Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
IKK 6	Nilai AKIP Dijen Perhubungan Laut	Nilai	85		Menunjuk Kepada Kabbag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Perencanaan	
					- Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku		0	0	100%	4.824.304.000	100%	0	0	0%	0%				
					- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Dijen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0		Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait		
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Dijen Perhubungan Laut	Nilai	3		Menunjuk Kepada Kabbag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Perencanaan	
					- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko		1	100%	349.630.000	100%	0	0	0	0		Pelaksanaan Bimtek SPIP untuk Tahun 2021 masih menunggu jadwal karena adanya perubahan sistem penilaian SPIP yang baru		
					- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)		0	100%	0	0	0	0	0	0		Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021 akan dilaksanakan dengan metode penilaian yang baru dan masih menunggu konfirmasi BKKP		
IKK 8	Persentase Daya Serap Dijen Perhubungan Laut	%	96,15		Menunjuk Kepada Kabbag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Keuangan	
					- Mengusulkan penetapan PPK, dan PPSM Kantor Pusat Dijen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan													Subbagian Perbendaharaan
					- Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Dijen Hubla ke Seditjen Hubla	SK Penetapan Bendahara				24.620.000	8,33		24.620.000		100				
					- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan dieliminasi berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik, serta dokumen terkait lainnya	Kegiatan dalam DIPA dan data dukung yang telah diteliti	2	2	2	85.000.000	3,51	2	241.872.000	100	284,56			Subbagian Anggaran	
					- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Subbagian Perbendaharaan (Koordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi	
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10		Menunjuk Kepada Kabbag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Hukum dan KLSN	
					1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan		10	21	50%	1.571.775.000	100%	2	#####	0	18%		Tidak terdapat banyak perubahan realisasi pada anggaran, karena hanya melakukan pembahasan penyusunan 2 RPM melalui	Sub Bagian Peraturan	
					2. Sosialisasi Permen, PP,		2	2	100%	1.708.393.000	100%	0	0	0	0		Telah dilaksanakan 1 kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi PP	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Pemertaausahaan BMN Dijen Hubla	%	10		Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:													Kabbag Umum dan Perengkapan	
					- Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu			0				0		0					











IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabag Organisasi dan Humas		
				1 Survey kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan		4	0	0%	0	0%	0	0	0%	0%		Dilaksanakan Bulan Desember 2021	Sub Bagian Humas			
				2 Bimbingan Teknis Kehumasan DiJen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%		Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas			
				3 Monitoring PPIID		3	0	100%	230.000.000	100%	1	20.988.000	15%	9%		Penambahan Anggaran Rp. 30.000,000	Sub Bagian Humas			
				4 Workshop Keterbukaan Informasi Publik DiJen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%		Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas			
				5 Bimbingan Teknis Tim Media Sosial DiJen Hubla		1	1	100%	800.000.000	100%	1	174.000.000	25%	22%		Telah Dilaksanakan Forum SMRT Session III tanggal 26-28 Oktober 2021	Sub Bagian Humas			
IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Hukum dan KLSN		
				- Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama		12	12	100%	574.887.000	100%	1	130.545.560	8%	0		Telah dilakukan revisi anggaran dengan penambahan sebesar Rp. 153.000.000,-	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional			
IKK 6	Nilai AKIP DiJen Perhubungan Laut	Nilai	85	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan		
				- Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		2	2	100%	4.811.181.000	100%	2	741.228.000	100%	15%						
				- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM DiJen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0		Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait				
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP DiJen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan		
				- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko		1	100%	345.330.000	100%	0	0%	0	0		Sudah Dilaksanakan Bimtek SPIP di Bulan September namun Belum ada realisasi pembayaran dan Ada Revisi POK			
				- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)		0	100%	0	0	0	0	0	0					
IKK 8	Persentase Daya Serap DiJen	%	96,15	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Keuangan		
				- Mengusulkan penetapan PPK, dan PPSPM Kantor Pusat DiJen Hubla ke KPA Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat DiJen Hubla ke SesdiJen Hubla	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan SK Penetapan Bendahara															Subbagian Perbendaharaan
				- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan diletakkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, serta dokumen terkait lainnya	Kegiatan dalam DIPA dan data dukungnya yang telah diteliti		3	3	100	137.500.000	5,67	3	271.190.000	100,00	197,23				Subbagian Anggaran	
				- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	Kegiatan strategis yang telah ditetapkan		2	2	100	147177000	2,86	3	258.380.000	150,00	175,56		Terdapat revisi penambahan anggaran pada kes. Strategis		Subbagian Perbendaharaan (Koordinator) Subbagian Anggaran Kabag Hukum dan KLSN	
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
				1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan		10	21	50%	1.196.343.000	100%	2	1.103.671.000	0	90%		Terdapat perubahan target dan realisasi pada anggaran, karena mulai adanya peningkatan kinerja dengan melakukan pembahasan penyusunan RPM secara tatap muka	Sub Bagian Peraturan			
				2. Sosialisasi Permen, PP.		2	2	100%	1.001.642.000	100%	0	702.372.880	0	70%		Terdapat pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu sosialisasi PP dan untuk sosialisasi PM akan dilaksanakan pada awal bulan November. Telah dilakukan revisi anggaran dengan pengurangan sebesar Rp. 706.751.000,-	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional			



**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

**BULAN : NOVEMBER TAHUN : 2021**

(1)	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan NOVEMBER				Realisasi Bulan NOVEMBER		% Capaian NOVEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
SP.1	Terkaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1 Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemran RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I); 2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari; 3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun);	0	0	0	-	0	-	0%	0%	0	Tidak terlaksana karena: Anggaran kegiatan tidak ada. Sampai dengan bulan Agustus 2020 masi dalam tahap seleksi penerimaan cpns 2019	Kabbag Kepegawaian		
		IKK 2 Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat	Surat usulan peserta diklat dari UPT dan kantor pusat	950 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,5	%	Anggaran BP2TL	91 peserta lulus diklat dan bersertifikat	0,047		mengalokasikan peserta yang belum terpenggaji untuk ikut diklat di bulan berikutnya	Kabbag Kepegawaian			
		IKK 3 Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabbag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:  - Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi										Kepada Kabbag Organisasi dan Humas			
				1	Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Menyapkan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla	2	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla
				2	Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi	5	0	100%	500.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla
				3	Workshop Pengelolaan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla										Anggaran di alihkan/revisi ke kegiatan no.7	Subbag Datin Hubla	
				4	Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	0	100%	100.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla
				5	Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehati, Sirani dan Portal Hubla	1	1	100%	100.000.000	100%	1	94.050.000	100%	100%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla
				6	Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Datin Hubla	1	0	100%	156.810.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla
				7	Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Pengembangan Modul SIRANI, Pengembangan Layanan Keperluan, Perubahan SEHATI terkait Penyesuaian	3	0	100%	650.000.000	100%	0	0	-	-	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development	Subbag Datin Hubla
				8	Pengadaan Server Ditjen Hubla	Visualisasi Data Perhubungan Laut	1	0	100%	200.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development	Subbag Datin Hubla
				9	Pembuatan Modul Billing Sistem Pada Aplikasi Sehati	Pembelian Perangkat Keras (Server)	1	0	100%	1.750.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla
						Membangun Blanko Sistem	1	0	100%	2.000.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Proses Pengerjaan Tim Development sesuai surat SPPBJ Nomor : PL.10711/1/BO/SPBJ/2021 Tanggal 29 September 2021	Subbag Datin Hubla

				10	10. Roadmap TIK Ditjen Hubla														
IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4		Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kepada Kabag Organisasi dan Humas
					1. Survey kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan		4	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%		Dilaksanakan Bulan Desember 2021	Sub Bagian Humas
					2. Bimbingan Teknis Kehumasan Ditjen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%		Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas	
					3. Monitoring PPID		3	0	100%	230.000.000	0%	0	0	0%	0%		Telah Dilaksanakan	Sub Bagian Humas	
					4. Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla		1	0	0%	900.000.000	0%	0	0	0%	0%		Terkena Penghematan Anggaran	Sub Bagian Humas	
					5. Bimbingan Teknis Tim Media Sosial Ditjen Hubla		1	0	100%	800.000.000	0%	0	0	0%	0%		Telah Dilaksanakan Forum SMRT Session III tanggal	Sub Bagian Humas	
IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di bidang transportasi laut	Kerjasama	12		Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Hukum dan KLSN
					- Menyusun naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama		12	12	100%	574.887.000	100%	3	105.943.000	25%	0	18%			Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	85		Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan
					- Melaksanakan Bimtek / sosialisasi serta kegiatan penunjang lainnya untuk penyusunan Dokumen SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		2	2	100%	4.770.271.000	100%	2	369.342.000	100%	8%				
					- Monitoring dan Pendampingan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Ditjen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait		1	1	100%	0	0	1	0	100%	0		Pemberian konsultasi terhadap UPT serta monitoring terhadap pengumpulan dokumen terkait		
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3		Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Perencanaan
					- Pelaksanaan Bimbingan teknis (BIMTEK) Sistem pengendalian Interen Pemerintah bagi pemilik resiko	Terlaksana Bimbingan Teknis SPIP bagi Pemilik Resiko dan terciptanya pemahaman pembuatan dokumen resiko		1	100%	345.330.000	100%	1	341.502.500	1	0,99				
					- Penilaian tingkat maturitas SPIP	Tercapainya Nilai Maturitas SPIP DJPL pada level 3 (Terdefinisi)		0	100%	0	0	0	0	0	0				
IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen	%	96,15		Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Keuangan
					- Mengusulkan penetapan PPK, dan PPSPM Kantor Pusat Ditjen Hubla ke KPA	SK Penetapan Pejabat Perbendaharaan		-	-	24.620.000	8,33	-	24.620.000	-	100				Subbagian Perbendaharaan
					- Mengusulkan penetapan Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Ditjen Hubla ke Sesditjen Hubla	SK Penetapan Bendahara													
					- Meneliti Kembali kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA.2020 dan menelaah kembali data dukung kegiatan yang akan dihilangkan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknik, serta dokumen terkait lainnya	Kegiatan dalam DIPA dan data dukungnya yang telah diteliti	4	4	100	210.029.000	8,67	4	245.502.300	100,00	116,89		Terdapat revisi penambahan anggaran menjadi sebesar Rp2.584.014.000,00		Subbagian Anggaran
					- Menetapkan kegiatan-kegiatan strategis TA.2021 untuk dilaporkan kepada Menteri Perhubungan terkait percepatan pelaksanaan kegiatan dimaksud	Kegiatan strategis yang telah ditelakan	0	0	0	0	0	3	258.380.000	-	-		Terdapat revisi penambahan anggaran pada keg. Strategis menjadi sebesar Rp6.537.789.000,00		Subbagian Perbendaharaan (Kordinator) Subbagian Anggaran Subbagian Akuntansi
IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep peraturan baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Jumlah	10		Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														Kabag Hukum dan KLSN
					1. Menetapkan rancangan dan peraturan yang ditetapkan		10	21	50%	1.196.343.000	100%	2	1.194.646.490	0	95%		Terdapat perubahan target dan realisasi pada anggaran, karena mulai adanya peningkatan		Sub Bagian Peraturan

					2. Sosialisasi Permen, PP,			2	2	100%	1.001.642.000	100%	1		-	50%	0%		Telah dilaksanakan sosialisasi PM, namun untuk pembayaran belum terealisasi.	Sub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional	
	IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Dijen Hubla	%	10	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabbag Umum dan Perengkapan	
					- Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu				1		-		1						-	KSOP Kuala Tanjung yang sudah mencapai 99.43% dalam realisasi Pencapaian PSP	
	IKK 11	Jumlah KSP yang dilaksanakan	Jumlah	3	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:															Kabbag Umum dan Perengkapan	
					- Memenuhi seluruh kriteria kegiatan yang akan di KSP sesuai dengan peraturan yang ada				1		-		1						-	KSP UIPP Kelas II Labuan Bajo	

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

BULAN : DESEMBER TAHUN : 2021

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan DESEMBER				Realisasi Bulan DESEMBER		% Capaian Bulan DESEMBER		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab					
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran								
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%								
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
SP.1	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	9	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT (TW. I); 2. Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2020 (TW. I) Januari; 3. Melakukan pemetaan penyebaran SDM Ditjen Hubla (1tahun).													Kabbag Kepegawaian				
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	1.900	Menunjuk Kabbag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: - Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat														Kabbag Kepegawaian			
		IKK 3	Peningkatan kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	82	Menunjuk Kepada Kabbag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:  - Membangun sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut yang terintegrasi															Kepada Kabbag Organisasi dan Humas		
							1	Penyusunan Buku Statistik Ditjen Hubla	Menyapkan Laporan Semester data statistik Ditjen Hubla	2	0	100%	190.000.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla		
							2	Monitoring Sistem Informasi Ditjen Hubla	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan konsinyering Sistem Informasi	5	2	100%	544.575.000	100%	2	210.423.000	100%	100%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla		
							3	Workshop Pengelolaan TIK	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla												Anggaran di alihkan/revisi kegiatan no 7	Subbag Datin Hubla	
							4	Maintenance Portal Ditjen Hubla	Membangun mobile Portal Hubla	1	1	100%	95.000.000	100%	1	93.775.000	100%	100%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla		
5	Maintenance Server Ditjen Hubla	Maintenance Jika terjadi kendala pada Server Aplikasi Sehat, Sirani dan Portal Hubla	1	1	100%	95.000.000	100%	0	0	100%	100%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla									
6	Bimtek Software dan Hardware Ditjen Hubla	Diklat Sistem Analisis untuk SDM Datin Hubla	1	0	100%	156.810.000	100%	0	0	0%	0%	Koordinasi	Sudah Terealisasi	Subbag Datin Hubla									
7	Maintenance Sistem Informasi Ditjen Hubla	Pengembangan Modul SIRANI, Pengembangan Layanan Kelembagaan, Perubahan SEHATI terkait Penyesuaian OSS RBA (Pengembangan modul Penilaian Beban Kerja dan Standar Kinerja Pelayanan dan Pelabuhan UPT Ditjen Hubla), Visualisasi Data Perhubungan Laut	4	2	100%	821.375.000	100%	2	420.987.640	100%	100%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla									
8	Pengadaan Server Ditjen Hubla	Pembelian Perangkat Keras (Server)	1	1	100%	1.620.880.000	100%	1	1.599.817.641	100%	100%	Koordinasi		Subbag Datin Hubla									



